Edisi 18 | 2026

https://bpkh.go.id/

BPKH News



Nilai Manfaat BPKH Meningkat,
Beban Pelunasan Jemaah Haji 2027 Lebih Ringan

MENAKAR KEADILAN BIAYA HAJI 2027

#SemuaBisaHaji

SUMPAH PEMUDA

BPK
Badan Pengelola Ke

Segenap Pimpinan dan Insan BPKH
mengucapkan

Selamat Hari Sumpah Pemuda

"Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia."





PELINDUNG
Fadlul Imansyah,
Kepala Badan Pelaksana BPKH RI
Ahmad Zaky,
Sekretaris Badan BPKH RI

PENANGGUNG JAWAB
Demmy R Budiawan,
Kepala Divisi Komunikasi Strategis BPKH RI

PEMIMPIN REDAKSI
Ricki Syahroni Putra,
Manajer Komunikasi Strategis BPKH RI

STAF REDAKSI
Yusuf Kadhafi

ALAMAT REDAKSI
Muamalat Tower Lantai 15
Jalan Prof. DR. Satrio No.Kav. 18,
Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pembaca yang budiman,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali, Majalah BPKH hadir untuk menyapa para pembaca dengan beragam informasi, inspirasi, serta perkembangan terkini mengenai pengelolaan keuangan haji di Indonesia.

Dalam edisi kali ini, e-Magazine BPKH mengangkat sejumlah perkembangan strategis, mulai dari penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 rata-rata Rp98,47 juta per jemaah, dengan 44,50 persen bersumber dari nilai manfaat, hingga dorongan penguatan peran BPKH melalui revisi Undang-Undang Pengelolaan Dana Haji.

Beragam langkah BPKH dalam memperluas manfaat bagi masyarakat juga hadir melalui rubrik Kabar BPKH. Mulai dari partisipasi dalam Anugerah Perjalanan Suci Indonesia 2026, peluncuran lima layanan terbaru BPKH Apps, hingga penguatan kolaborasi ekonomi dan keuangan syariah melalui Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026. Sementara itu, rubrik Figur Istimewa menghadirkan Kepala BPKH, Fadlul Imansyah, yang mengulas pengelolaan dana haji melalui instrumen investasi sesuai prinsip syariah.

Tak ketinggalan, rubrik Pojok Viral mengajak pembaca menelusuri Masjid Juma Derbent di Rusia, salah satu jejak panjang peradaban Islam yang tetap bertahan hingga kini.

Kami berharap edisi ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai pengelolaan keuangan haji, inovasi layanan, serta kontribusi BPKH dalam membangun ekosistem haji dan ekonomi syariah yang semakin kuat.

Selamat membaca.

Tim Redaksi Majalah BPKH

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam hangat, Tim Redaksi



16
NILAI MANFAAT MENOPANG LANGKAH MENUJU BAITULLAH



14
BPKH RAIH PROMINENT AWARDS 2026



10
SINERGI GLOBAL DAN DIGITALISASI PADA ISEF & IHFF 2026

LEBIH DEKAT DENGAN BAITULLAH LEWAT BPKH APPS 04
MEMPERKUAT BENTENG AMANAH DANA HAJI 07
ANUGERAH PERJALANAN SUCI INDONESIA 2026 08
MENJAGA AMANAH, MEMBUKA RUANG PEMERIKSAAN 20
MENGELOLA DANA HAJI SEDARI DINI 26
LENSA UMAT 28
LANGKAH MUDA MENUJU BAITULLAH 30
PERTARUHAN KEBERLANJUTAN DANA HAJI 32
HIKMAH KRISIS LEMBAGA TABUNG HAJI 35
TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK MENJAGA AMANAH JEMAAH 37


KEMENHAJ DORONG
PENGUATAN BPKH
DALAM REVISI UU
24


REVISI UU JADI
MOMENTUM
PERKUAT BPKH
25


7.700 LITER AIR BERSIH
UNTUK PENYINTAS GEMPA NTT
BPKH
SERAH TERIMA
NUSA TENGGARA TIMUR
38


SEABAD GONTOR,
Rp300 JUTA
UNTUK PENDIDIKAN
BPKH
SERAH TERIMA
Program Kemaslahatan 2026
Universitas Darussalam Gontor
40

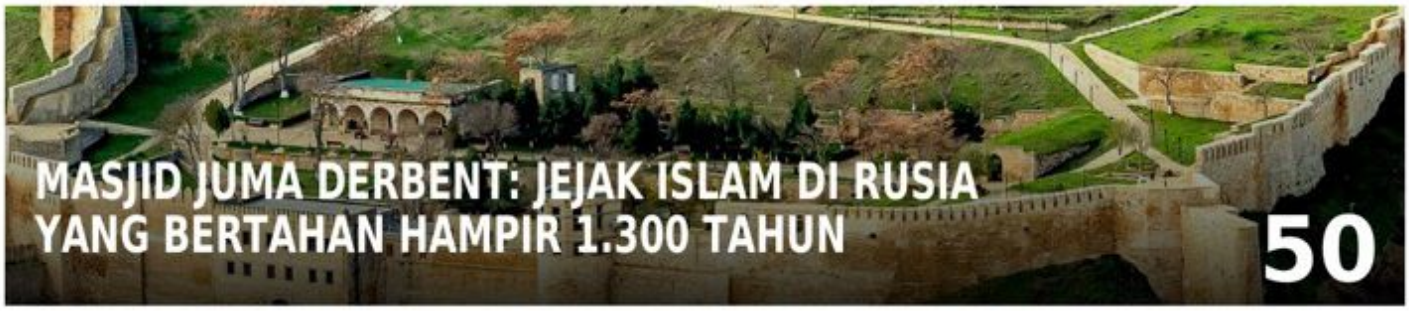

50 UMKM KRIYA TEKSTIL
MALANG NAIK KELAS
BPKH
Program Pelatihan UMKM
dan Bantuan Peralatan Usaha
42


KLINIK LEBIH LAYAK
UNTUK MAHASISWA
DAN PASIEN
BPKH
41


MENEBAR KEBAIKAN
DARI MIMBAR DIGITAL
44


SISTEM HAJI SAUDI
100 PERSEN
KE CLOUD
46


MENYIAPKAN WAJAH
HAJI MASA DEPAN
DARI MAKKAH
48


MASJID JUMA DERBENT: JEJAK ISLAM DI RUSIA
YANG BERTAHAN HAMPIR 1.300 TAHUN
50



LEBIH DEKAT DENGAN BAITULLAH LEWAT BPKH APPS

Lima layanan baru BPKH Apps hadir untuk mendampingi persiapan haji, mulai dari kebutuhan transaksi, akses informasi, hingga kemudahan berwakaf dalam satu aplikasi.

Bagi calon jemaah, perjalanan menuju Baitullah dimulai jauh sebelum hari keberangkatan. Ada pengetahuan manasik yang perlu diperdalam, kebutuhan finansial yang harus dipersiapkan, serta informasi yang perlu dipahami. Masa penantian pun menjadi kesempatan untuk menata kesiapan agar kelak dapat beribadah dengan lebih tenang.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berupaya mendampingi proses tersebut melalui pengembangan BPKH Apps. Lima layanan baru dihadirkan untuk mendekatkan berbagai kebutuhan persiapan haji dalam satu ekosistem digital: *e-Wallet* Haji, Transfer, Dompet Haji, Tanya Haji, dan *Islamic Social Fund*.

Kelima layanan itu diperkenalkan dalam *Soft Launching BPKH Apps* bertajuk "Experience The New BPKH Apps, Your Digital Hajj Lifestyle Companion" di BJ Habibie Room, Muamalat Tower, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Bagi Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, ukuran keberhasilan transformasi digital terletak pada manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Transformasi digital bagi BPKH bukan sekadar menghadirkan teknologi atau menambah layanan dalam sebuah aplikasi. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan kemudahan dan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mempersiapkan perjalanan ibadah haji," ujar Fadlul.

Transaksi dan Informasi dalam Satu Genggaman

Melalui *e-Wallet*





Haji, pengguna dapat melakukan pengisian saldo atau top up dan menggunakan saldo tersebut sebagai sumber dana transaksi. Layanan ini melengkapi kebutuhan pengguna yang ingin bertransaksi melalui BPKH *Apps*.

Untuk pengiriman dana, tersedia layanan Transfer ke rekening bank dalam negeri dengan biaya Rp1.500 per transaksi.

Sementara itu, Dompet Haji terhubung dengan tabungan bank syariah yang dapat digunakan sebagai sumber dana transaksi.

Pengembangan BPKH *Apps* juga menjangkau kebutuhan informasi. Melalui Tanya Haji, pengguna dapat mengajukan pertanyaan seputar haji dan memperoleh respons berbasis kecerdasan buatan atau *artificial intelligence (AI)*, disertai sumber informasi yang tersedia.

Adapun *Islamic Social Fund* membuka akses bagi masyarakat untuk memilih program wakaf dan melakukan transaksinya melalui aplikasi. Program yang tersedia melibatkan Baitul Mal Muamalat dan Harika Foundation sebagai *nazhir* atau pengelola wakaf.

Kelima layanan tersebut melengkapi fitur yang telah hadir sebelumnya, antara lain setoran awal haji, cek saldo dan nilai manfaat, estimasi keberangkatan, informasi portofolio keuangan haji, buku saku digital, informasi kegiatan BPKH, serta layanan Islami.

Mendampingi Setiap Tahap Persiapan

Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander menjelaskan, pengembangan aplikasi diarahkan untuk menghadirkan pengalaman yang lebih terintegrasi. Masyarakat diharapkan semakin mudah mengakses berbagai layanan pendukung persiapan haji melalui satu aplikasi.

"Kami ingin BPKH *Apps* hadir bukan hanya sebagai aplikasi untuk melihat informasi haji, tetapi sebagai teman perjalanan digital masyarakat. Mulai dari mengetahui estimasi keberangkatan, melihat informasi portofolio keuangan haji, memenuhi kebutuhan transaksi, hingga mendapatkan informasi seputar haji,





semuanya kami upayakan semakin mudah diakses dalam satu ekosistem," ujar Harry.

Kemudahan akses tersebut menjadi bagian penting dalam mendampingi calon jemaah selama masa persiapan. Informasi, layanan finansial, dan kebutuhan pendukung lainnya diupayakan hadir secara lebih praktis agar dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan pengguna.

Disempurnakan Bersama Pengguna

Sebelum diperkenalkan secara lebih luas, BPKH *Apps* terlebih dahulu menjalani uji coba terbatas. Proses ini melibatkan mitra Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), mitra strategis BPKH *Apps*, serta calon jemaah haji.

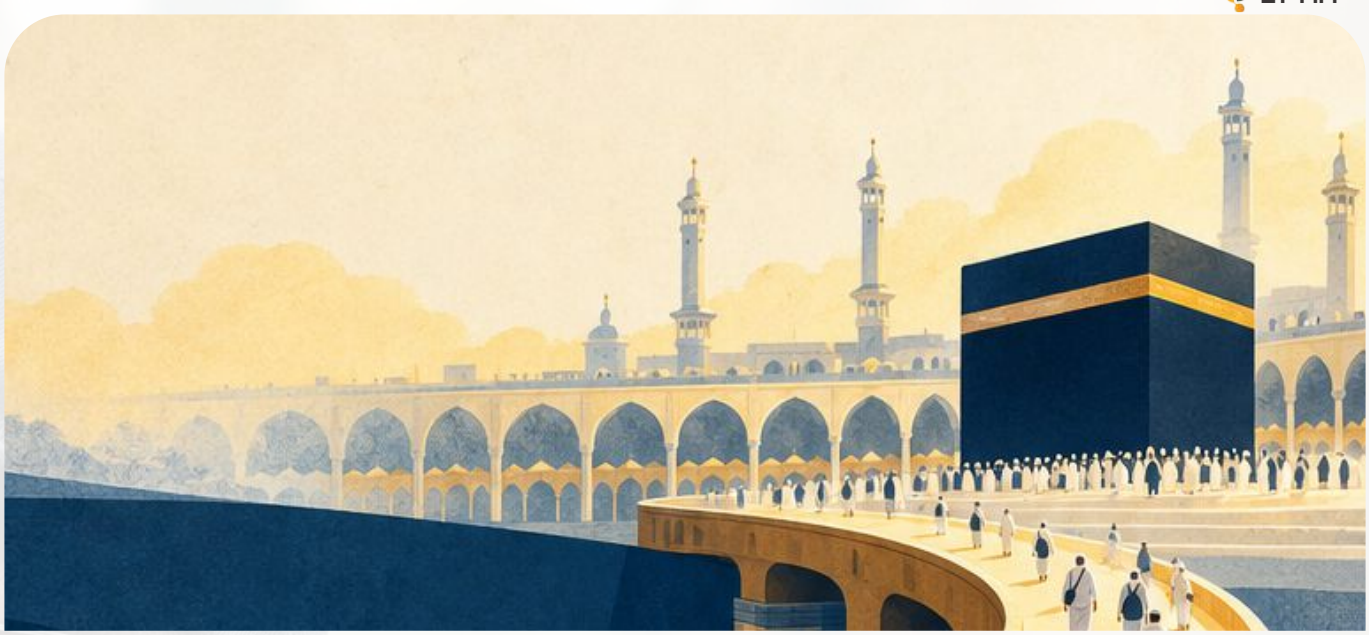
Para peserta mencoba langsung layanan yang tersedia sekaligus memberikan masukan mengenai pengalaman penggunaannya. Masukan tersebut menjadi dasar penyempurnaan aplikasi dan rekomendasi menuju peluncuran yang lebih luas.

Melalui proses ini, pengembangan BPKH *Apps* diharapkan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dari sisi manfaat maupun kemudahan penggunaan.

"Pada akhirnya, teknologi hanyalah sarana. Tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan dan kemaslahatan. Kami berharap BPKH *Apps* dapat menjadi bagian dari setiap langkah masyarakat dalam mempersiapkan perjalanan menuju haji," tutur Harry.

Dengan layanan yang semakin terintegrasi, BPKH *Apps* diharapkan dapat mendampingi masyarakat mengisi masa penantian dengan persiapan yang lebih terarah. Setiap langkah kecil—memahami informasi haji, menata kebutuhan finansial, hingga menunaikan wakaf—menjadi bagian dari perjalanan menuju Baitullah.





MEMPERKUAT BENTENG AMANAH DANA HAJI

Pengalaman Malaysia menjadi pengingat pentingnya tata kelola, kemandirian, dan pengawasan dalam menjaga dana jemaah.

Di balik dana haji, tersimpan harapan masyarakat untuk beribadah ke Tanah Suci. Menjaga kepercayaan itu membutuhkan sistem pengelolaan yang mampu menyeimbangkan manfaat dan kehati-hatian.



Anggota Komisi VIII DPR RI Maman

Imanulhaq menyoroti pentingnya pembelajaran dari persoalan Lembaga Tabung Haji (LTH) Malaysia. Dalam keterangan tertulis pada 3 September 2026, ia menilai pengalaman tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat BPKH.

Tiga Pilar Perlindungan

Menurut Maman, ketahanan BPKH bertumpu pada tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan atau *Governance, Risk Management & Compliance (GRC)*.

Ketiganya saling melengkapi: memperjelas tanggung jawab pengambilan keputusan, mengukur risiko investasi, serta memastikan pengelolaan tetap mengikuti aturan dan prinsip syariah.

Kemandirian kelembagaan juga perlu berjalan bersama akuntabilitas. Keputusan profesional harus disertai pertanggungjawaban melalui pengawasan Dewan Pengawas, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi VIII DPR RI sesuai kewenangan masing-masing.

Menjaga Kewaspadaan

Maman mengingatkan agar capaian kinerja tidak menurunkan kewaspadaan. Pertumbuhan dana kelolaan justru menuntut pengawasan semakin kuat dan tindak lanjut rekomendasi yang konsisten.

Bagi BPKH, pembelajaran ini menegaskan pentingnya menjaga kesehatan dana dalam setiap keputusan. Keberhasilan pengelolaan perlu diukur dari manfaat yang berkelanjutan sekaligus terpeliharanya amanah jemaah.



ANUGERAH PERJALANAN SUCI INDONESIA 2026

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali menegaskan peran strategisnya dalam membangun dan memperkuat ekosistem perhajian Indonesia yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan saat BPKH menghadiri ajang penghargaan bergengsi Anugerah Perjalanan Suci Indonesia 2026 yang digelar oleh tvOne di Studio 2 tvOne TCI, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (31/8/2026).

Ajang Anugerah Perjalanan Suci Indonesia 2026 diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, inovasi, serta komitmen para pelaku industri dan pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji, umrah, dan wisatawan muslim Indonesia. Dalam gelaran tersebut, tvOne menyerahkan sebanyak 16 kategori penghargaan kepada berbagai pihak yang dinilai berkontribusi besar dalam ekosistem perjalanan ibadah religi.

BPKH menjadi salah satu lembaga utama yang menerima penghargaan atas kontribusi dan peran vitalnya dalam menjaga keberlanjutan penyelenggaraan haji di tanah air. Selain BPKH, apresiasi juga diberikan kepada Kementerian Haji dan Umrah RI yang dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, serta jajaran pelaku industri seperti perbankan syariah, maskapai penerbangan, dan penyelenggara ibadah haji/umrah.

Menjaga Amanah dan Keberlanjutan Dana Haji

Kehadiran BPKH dalam forum ini mempertegas posisinya sebagai pilar utama pengelolaan keuangan haji nasional. Dalam ekosistem perhajian Indonesia, BPKH mengemban amanah besar untuk mengelola dan menjaga dana jemaah serta mengoptimalkan nilai manfaat secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Penguatan ekosistem haji yang diusung BPKH berfokus pada tiga pilar utama:

- **Menjaga Dana Haji:** Memastikan perlindungan terhadap dana jemaah melalui prinsip pengelolaan keuangan yang prudent dan berkelanjutan.
- **Optimalisasi Nilai Manfaat:**

Mengembangkan investasi dan pengelolaan dana haji untuk menghasilkan nilai manfaat yang optimal sesuai prinsip syariah serta tata kelola yang baik (good governance).

- **Menjaga Keberlanjutan:** Memastikan setiap keputusan pengelolaan keuangan yang diambil saat ini tetap memperhitungkan dan menjaga kepentingan jemaah di masa depan.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, menekankan pentingnya sinergi kolektif antar-lembaga dalam menjawab tantangan pengelolaan haji nasional.



Kolaborasi sebagai Kunci Utama

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Amri Yusuf, menekankan pentingnya sinergi yang solid di antara seluruh pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan tata kelola haji dengan jumlah jemaah terbesar di dunia.

"Kolaborasi dan sinergi antara BPKH, Kementerian Haji dan Umrah, serta seluruh pemangku kepentingan perhajian menjadi kunci utama dalam memperkuat ekosistem haji Indonesia. Dengan jumlah jemaah yang sangat besar, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk membangun ekosistem haji yang semakin kuat, berkualitas, dan berkelanjutan demi memberikan manfaat terbaik bagi jemaah," ujar Amri Yusuf.

Melalui momentum penganugerahan ini, BPKH berharap kolaborasi lintas sektor—baik dengan pemerintah, asosiasi, perbankan, maupun pelaku usaha perjalanan—dapat terus ditingkatkan. Langkah bersama ini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pelayanan ibadah haji yang semakin aman, nyaman, dan memberikan kemaslahatan seluas-luasnya bagi umat.





185 T UNTUK PENGUATAN EKOSISTEM DANA HAJI

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi, efisiensi investasi, dan keberlanjutan tata kelola dana haji melalui ajang Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 dan The 8th International Hajj Fund Forum (IHFF) 2026 yang berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.

Partisipasi BPKH dalam ISEF 2026 serta penyelenggaraan IHFF ke-8 bersama Bank Indonesia menjadi momentum penting untuk memperluas kemitraan strategis dengan regulator, pemerintah, dan pelaku industri keuangan syariah global. Selain membuka booth edukasi publik bersama anak usahanya—Bank Muamalat Indonesia dan BPKH Limited—BPKH merumuskan arah kebijakan investasi yang berkelanjutan demi kemaslahatan jemaah.

Mengelola Dana Secara Optimal dan Bijak

Hingga September 2026, akumulasi dana kelolaan haji yang diamanahkan kepada BPKH mencapai Rp185,73 triliun (sekitar USD10,3 miliar). Skala dana yang besar ini menuntut





pengelolaan yang cermat, menyeimbangkan kebutuhan likuiditas, mitigasi risiko, kepatuhan syariah, serta nilai manfaat yang adil bagi jemaah.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan haji kini berorientasi pada nilai keberlanjutan. Potensi ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sangat masif; belanja haji jemaah Indonesia diperkirakan mencapai Rp21 triliun, sementara belanja umrah berkisar Rp30–40 triliun. Nilai aktivitas ekonomi ini diproyeksikan mendekati Rp200 triliun pada tahun 2030.

"Aktivitas ekonomi haji dan umrah ini harus memberikan nilai tambah kembali bagi bangsa. Melalui strategi investasi yang bertanggung jawab dan kemitraan dengan lembaga keuangan Muslim internasional, kami ingin meningkatkan kualitas layanan jemaah sekaligus memastikan dana tetap aman dan produktif," tegas Fadlul.

Tiga Pilar Ekosistem Keuangan Haji Berkelanjutan

Dalam gelaran IHFF 2026, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyoroti bahwa kepercayaan publik adalah aset terbesar yang harus dijaga BPKH.

Juda memaparkan tiga pilar utama untuk memperkuat ekosistem keuangan haji yang berkelanjutan:

- **Tata Kelola yang Baik *(Good Governance)*:** Menjamin transparansi, akuntabilitas, independensi, serta keadilan antargenerasi agar hak jemaah tunggu maupun jemaah berangkat tetap terlindungi.
- **Investasi Jangka Panjang *(Long-Term Investment)*:** Menerapkan alokasi aset yang presisi, pengawasan risiko yang terukur, serta pendekatan *four-eyes* (keseimbangan antara kriteria keuangan dan kesejahteraan jemaah).
- **Inovasi dan**







Transformasi Digital *(Innovation)*: Mengoptimalkan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan analitik data untuk mendeteksi potensi risiko, efisiensi operasional, serta meningkatkan transparansi publik.

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, turut mendukung upaya BPKH dan menegaskan pentingnya menjaga dana haji sebagai restricted fund yang sepenuhnya didedikasikan untuk ekosistem perhajian melalui diversifikasi portofolio yang aman.

Ekspansi Ekosistem: Investasi Langsung di Arab Saudi dan Kemitraan Internasional

Ketua Dewan Pengawas BPKH, Firmansyah N. Nazaroedin, menyampaikan bahwa BPKH kini bergerak lebih jauh dari sekadar pengelola aset keuangan. Sejalan dengan Visi Arab Saudi 2030, BPKH didorong menjadi mitra investasi strategis langsung pada rantai pasok ekosistem haji di Makkah dan Madinah, khususnya sektor akomodasi (perhotelan), katering, logistik, dan layanan kesehatan.

"Investasi langsung di Tanah Suci berpotensi menekan risiko nilai tukar (hedging) dan inflasi, sekaligus meningkatkan kepastian kualitas layanan bagi jemaah Indonesia," urai Firmansyah.





Komitmen internasional BPKH juga diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman *(MoU)* dengan **Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD)** di sela-sela forum IHFF 2026. Kerja sama ini mencakup penjajakan investasi bersama di bidang infrastruktur, perhotelan, dan sektor keuangan syariah di kawasan Timur Tengah. Kemitraan ini turut melibatkan BPKH Limited dan Bank Muamalat Indonesia guna memperkuat posisi Indonesia dalam peta ekonomi Islam global.

Melalui integrasi tata kelola yang transparan, akselerasi teknologi, dan ekspansi investasi strategis global, BPKH terus berkomitmen menjaga amanah jemaah demi mewujudkan penyelenggaraan haji yang berkualitas dan berkelanjutan.





BPKH RAIH PROMINENT AWARDS 2026, PERKUAT KOMITMEN PENGELOLAAN DANA HAJI YANG BERDAMPAK BAGI JEMAAH

BPKH meraih Prominent Awards 2026 atas pengelolaan dana haji nasional. Penghargaan ini menjadi penyemangat untuk terus menjaga kepercayaan dan menghadirkan manfaat bagi jemaah.

Di balik pengelolaan dana haji, terdapat harapan masyarakat yang menabung dan menantikan perjalanan menuju Baitullah. Menjaga harapan tersebut membutuhkan ketelitian, keterbukaan, dan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab.

Komitmen itu memperoleh apresiasi melalui Prominent Awards 2026 kategori Excellence in National Hajj Fund Stewardship. Penghargaan diterima Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah di Grand Studio Metro TV, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Ajang tersebut diselenggarakan Metro TV bersama Salutee.id.

Pertumbuhan yang Menghadirkan Manfaat

Berdasarkan siaran pers BPKH, dana kelolaan mencapai Rp180,72 triliun pada Desember 2025, meningkat dari Rp142 triliun pada 2020. Sepanjang 2025, nilai manfaat tercatat sebesar Rp12,08 triliun.

Besarnya kepercayaan masyarakat tercermin dari komposisi dana kelolaan: sekitar 97,83 persen berasal dari setoran jemaah.

“Kepercayaan jemaah merupakan amanah yang harus kami jaga melalui pengelolaan dana haji yang prudent, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat bagi jemaah,” ujar Fadlul.

Menjaga Kesehatan Keuangan

BPKH melaporkan rasio likuiditas sebesar 2,47 kali BPIH dan rasio solvabilitas 100,62 persen. Akuntabilitas pelaporan keuangannya juga ditandai opini Wajar Tanpa Pengecualian delapan tahun berturut-turut dari BPK.

Mengusung tema Indonesia Berdaya, Prominent Awards 2026 memberikan 33 penghargaan dalam lima klaster. BPKH menjadi penerima dalam klaster Koperasi, BUMD & Government. Penilaian mencakup inovasi, kompetensi, kontribusi, dampak, keberlanjutan, dan kepemimpinan.

Melanjutkan Tanggung Jawab

Sebuah penghargaan memberi kesempatan untuk mengapresiasi pekerjaan yang telah dilakukan sekaligus menata langkah berikutnya. Bagi lembaga pengelola dana publik, pengakuan perlu diterjemahkan menjadi semangat memperbaiki mutu kerja sehari-hari.

Jemaah membutuhkan pengelolaan yang dapat dipercaya sepanjang masa penantian. Karena itu, ketelitian dalam mengambil keputusan dan kejelasan dalam menyampaikan informasi tetap memiliki arti penting.

Dari panggung penghargaan, tanggung jawab kembali pada amanah yang sama: merawat kepercayaan masyarakat melalui pekerjaan yang cermat dan manfaat yang terus dijaga.

DANA HAJI DIJAGA. NILAI MANFAAT DIRASAKAN JEMAAH.

Nilai manfaat membantu meringankan biaya haji.





"Biaya haji jadi lebih ringan."

Muhammad Sukri • Embarkasi Lombok



"Jemaah makin terbantu."

Farid Mukhtar • Pekanbaru



"Alhamdulillah seneng, merasa diringankan."

Khoirul Umam • Embarkasi Lombok



"Sangat meringankan sekali."

Romli • Pasuruan

NILAI MANFAAT MENOPANG LANGKAH MENUJU BAITULLAH



Penetapan biaya haji 2027 memperlihatkan peran penting nilai manfaat dalam pembiayaan perjalanan ke Tanah Suci. Di balik dukungan tersebut, ada tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan jemaah berangkat dan hak mereka yang masih menunggu.

Bagi banyak keluarga, persiapan menuju Baitullah berlangsung selama bertahun-tahun. Penghasilan disisihkan, tabungan dijaga, dan kebutuhan rumah tangga diatur agar cita-cita berhaji dapat terwujud. Ketika waktu keberangkatan semakin dekat, kepastian biaya menjadi salah satu informasi yang paling dinantikan.

Karena itu, pembahasan biaya haji selalu memiliki arti yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Angka yang ditetapkan akan menjadi bagian dari perencanaan keluarga, sekaligus menentukan kebutuhan pendanaan untuk menghadirkan layanan selama perjalanan ibadah.

Pada 7 Oktober 2026, DPR RI bersama pemerintah menetapkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp98.466.351 per jemaah. Sebesar Rp43.817.526 atau 44,50 persen ditopang nilai manfaat hasil pengelolaan keuangan haji. Adapun Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) ditetapkan rata-rata Rp54.648.825 atau 55,50 persen.

Dalam rincian yang diumumkan, pemenuhan Bipih mencakup setoran awal Rp25 juta, nilai manfaat virtual account Rp3,4 juta, subsidi





pemerintah Rp3,2 juta, dan setoran pelunasan Rp23.048.825. Artinya, angka Bipih perlu dipahami bersama komponen pembentuknya; jumlah tersebut berbeda dari setoran pelunasan.

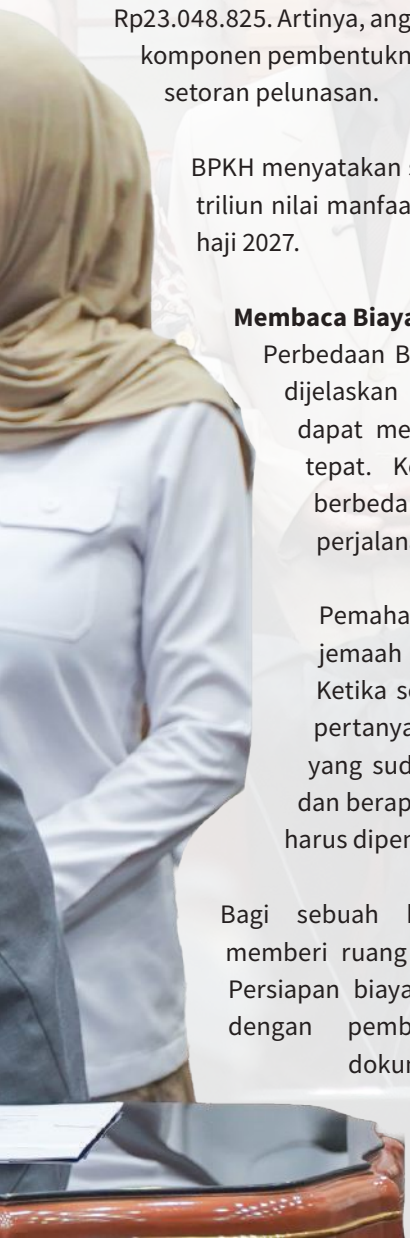
BPKH menyatakan siap menyalurkan sekitar Rp8,83 triliun nilai manfaat untuk mendukung operasional haji 2027.

Membaca Biaya Haji dengan Lebih Utuh

Perbedaan BPIH, Bipih, dan pelunasan perlu dijelaskan secara jernih agar masyarakat dapat membaca informasi biaya dengan tepat. Ketiganya menunjukkan bagian berbeda dalam struktur pembiayaan perjalanan haji.

Pemahaman tersebut membantu calon jemaah menata persiapan finansial. Ketika sebuah angka biaya diumumkan, pertanyaan berikutnya adalah apa saja yang sudah diperhitungkan di dalamnya dan berapa kebutuhan setoran yang masih harus dipenuhi.

Bagi sebuah keluarga, kejelasan informasi memberi ruang untuk merencanakan langkah. Persiapan biaya dapat berjalan berdampingan dengan pembekalan ibadah, pemenuhan dokumen, serta penjagaan kesehatan menjelang keberangkatan.





Menemukan Keseimbangan Pembiayaan

Sebelum penetapan biaya, BPKH telah menekankan pentingnya menimbang keterjangkauan bersama kemampuan keuangan haji dalam jangka panjang. Dalam pembahasan bersama Komisi VIII DPR RI pada Agustus 2026, perhatian diarahkan pada keseimbangan kepentingan jemaah berangkat dan jemaah tunggu.

Sebagai latar kondisi keuangan saat itu, saldo dana haji per Juli 2026 tercatat Rp182,34 triliun, sedangkan nilai manfaat yang dihasilkan mencapai Rp7,01 triliun. BPKH mengingatkan bahwa pertumbuhan dana perlu diikuti kebijakan pemanfaatan yang terukur.





"Yang perlu kita jaga adalah keseimbangan antara Bipih, nilai manfaat, dan kemampuan keuangan haji," kata Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah.

Pesan tersebut menempatkan pembiayaan haji dalam rentang waktu yang panjang. Kebutuhan satu musim keberangkatan harus diperhitungkan bersama kemampuan melayani jemaah pada tahun-tahun berikutnya.

Manfaat yang Menjangkau Masa Tunggu

Peran nilai manfaat juga terlihat sebelum jemaah memperoleh giliran keberangkatan. Pada penyaluran tahap I tahun 2026, BPKH mengalokasikan lebih dari Rp2,06 triliun kepada sekitar 5,7 juta jemaah haji reguler dan khusus yang masih menunggu. Besaran yang diterima setiap jemaah dapat berbeda, antara lain dipengaruhi





masa tunggu. Pencatatannya melalui nilai manfaat *virtual account* dapat dipantau lewat BPKH Apps.

BPKH menjelaskan bahwa alokasi untuk penyelenggaraan haji dan distribusi kepada jemaah tunggu perlu dijaga secara proporsional. Semakin besar bagian yang digunakan untuk mendukung keberangkatan tahun berjalan, semakin terbatas ruang distribusi melalui virtual account.

Hubungan tersebut membantu menjelaskan mengapa pembiayaan haji membutuhkan pertimbangan yang menyeluruh. Di dalam satu ekosistem terdapat jemaah yang segera berangkat, sekaligus masyarakat yang masih memelihara harapan untuk tahun-tahun mendatang.

Menjaga Kepercayaan hingga Hari Keberangkatan

Bagi jemaah, kepercayaan tumbuh ketika informasi dapat dipahami dan persiapan dapat dilakukan dengan lebih pasti. Penjelasan mengenai sumber pembiayaan, penggunaan manfaat, dan kebutuhan pelunasan menjadi bagian penting dari pelayanan informasi.

Di balik setiap perhitungan terdapat tujuan yang dekat dengan masyarakat: membantu perjalanan ibadah terlaksana dengan baik serta menjaga harapan mereka yang masih menunggu.

Di situlah amanah pengelolaan keuangan haji memperoleh maknanya. Dana yang dititipkan membawa cita-cita banyak keluarga. Menjaganya berarti merawat kesempatan agar langkah menuju Baitullah dapat terus berlanjut, dari satu musim haji ke musim berikutnya.

MENJAGA AMANAH, MEMBUKA RUANG PEMERIKSAAN

Keterbukaan terhadap audit merupakan bagian dari tanggung jawab pengelolaan dana haji. Kepercayaan jemaah perlu dirawat melalui bukti, penjelasan yang jernih, dan kesungguhan menindaklanjuti perbaikan.

Kepercayaan jemaah akan tumbuh ketika keterbukaan menjadi praktik sehari-hari, bukti menjadi dasar penjelasan, dan perbaikan dapat dirasakan kesinambungannya.

Dana haji membawa harapan yang sangat personal. Di dalamnya terdapat hasil kerja, kedisiplinan menabung, dan cita-cita keluarga untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Karena itu, percakapan mengenai pengelolaannya selalu menyentuh sesuatu yang lebih dekat daripada angka dalam laporan keuangan: rasa percaya.

Kepercayaan tersebut menuntut pertanggungjawaban yang dapat diuji. Masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai bagaimana amanah dijalankan, sementara lembaga pengelola memerlukan pemeriksaan sebagai sarana untuk menilai dan memperbaiki pekerjaannya. Dalam hubungan inilah keterbukaan terhadap audit memperoleh arti penting.

Pada 29 September 2026, BPKH menyatakan kesiapan mendukung rencana audit forensik atas tata kelola keuangan haji, termasuk menyediakan data dan dokumen sesuai ketentuan. Pemerintah berencana berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai pelaksanaannya.

“Pemeriksaan merupakan bagian penting untuk memastikan Keuangan Haji dikelola secara transparan, akuntabel, hati-hati, dan sesuai prinsip syariah,” ujar Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah.

Keterbukaan sebagai Sikap Kelembagaan

Dalam pandangan editorial ini, kesiapan diperiksa perlu diterjemahkan menjadi sikap kelembagaan yang konsisten. Data harus tersedia ketika dibutuhkan, pertanyaan pemeriksa dijawab secara memadai, dan rekomendasi ditempatkan sebagai bahan pembenahan.





Bagi publik, sikap seperti itu lebih bermakna daripada pernyataan yang berulang. Masyarakat dapat menilai kesungguhan sebuah lembaga melalui kemampuannya menjelaskan keputusan dan menerima evaluasi atas keputusan tersebut.

Keterbukaan juga membutuhkan ketertiban. Informasi yang disampaikan harus memiliki konteks, periode, serta dasar pencatatan yang jelas. Angka yang benar dapat menimbulkan pemahaman keliru apabila dilepaskan dari penjelasannya. Sebaliknya, penjelasan yang mudah dipahami akan membantu masyarakat mengikuti persoalan secara lebih tenang dan rasional.

BPKH menyebut laporan keuangannya diperiksa rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian delapan kali berturut-turut hingga tahun buku 2025. Laporan konsolidasian tahun tersebut juga telah dipublikasikan.

Capaian pemeriksaan patut menjadi dorongan untuk terus meningkatkan mutu pertanggungjawaban. Dalam budaya organisasi yang sehat, evaluasi berjalan sebagai kebiasaan kerja. Setiap pemeriksaan memberi kesempatan untuk melihat apakah prosedur benar-benar berfungsi, apakah informasi mudah ditelusuri, dan apakah pengendalian tetap memadai ketika kebutuhan organisasi berkembang.

Mengutamakan Bukti dan Ketepatan

BPKH menekankan perlunya mandat pemeriksaan yang jelas, pemeriksa independen, metodologi terdokumentasi, perlindungan data, serta temuan yang dapat ditelusuri. Pemeriksaan juga diharapkan mencocokkan data jemaah dan transaksi, menguji penggunaan nilai manfaat, serta menilai keberlanjutan keuangan haji.

Prinsip berbasis bukti semestinya menjadi pegangan bersama dalam membaca proses tersebut. Rencana pemeriksaan perlu dipahami sesuai tahapnya. Kesimpulan mengenai suatu persoalan harus mengikuti hasil pengujian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kedisiplinan ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam percakapan publik. Pengelola berkewajiban memberikan keterangan yang memadai. Media perlu menyampaikan informasi dengan konteks yang utuh. Masyarakat berhak mengajukan pertanyaan dan memperoleh jawaban yang jelas.

Ketepatan bahasa memiliki peran besar. Istilah yang menyangkut keamanan dana dapat memengaruhi ketenangan jemaah dan keluarganya. Karena itu, komunikasi perlu membedakan rencana, proses, temuan, dan kesimpulan pemeriksaan. Pembedaan tersebut membantu publik memahami perkembangan tanpa harus menebak-nebak.



Perbaikan Harus Terlihat

Nilai sebuah pemeriksaan akan semakin terasa ketika rekomendasinya menghasilkan perubahan yang dapat dinilai. Karena itu, perhatian perlu diteruskan pada tindak lanjut: apa yang diperbaiki, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana penyelesaiannya dipantau.

Dalam kerangka editorial, pertanggungjawaban yang baik semestinya memberi ruang bagi publik untuk memahami kemajuan tersebut, dengan tetap menghormati informasi yang wajib dilindungi. Keterbukaan dapat diwujudkan melalui penjelasan yang proporsional mengenai proses dan hasil pembenahan.

Bagi jemaah, b a h a s a

pertanggungjawaban pada akhirnya harus dapat menjawab pertanyaan sederhana: bagaimana amanah mereka dijaga? Jawabannya perlu hadir melalui kerja yang tertib dan informasi yang dapat dipercaya.

Merawat Kepercayaan dalam Jangka Panjang

Pemeriksaan merupakan bagian dari hubungan panjang antara lembaga dan masyarakat. Hubungan itu dirawat setiap kali pertanyaan dijawab dengan jujur, kekurangan diperbaiki dengan sungguh-sungguh, dan keputusan dijelaskan secara bertanggung jawab.

Pengelolaan dana haji membutuhkan kesediaan untuk terus diuji karena amanahnya melampaui satu periode kepemimpinan dan satu musim keberangkatan. Di belakangnya terdapat banyak keluarga yang sedang bersiap, menunggu, dan memelihara harapan.

Karena itu, dukungan terhadap pemeriksaan layak menjadi momentum untuk memperkuat budaya akuntabilitas. Kepercayaan jemaah akan tumbuh ketika keterbukaan menjadi praktik sehari-hari, bukti menjadi dasar penjelasan, dan perbaikan dapat dirasakan kesinambungannya.





KEMENHAJ DORONG PENGUATAN BPKH DALAM REVISI UU PENGELOLAAN DANA HAJI

Revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji menjadi momentum untuk memperkuat BPKH. Kepentingan jemaah perlu menjadi dasar dalam merumuskan kewenangan dan pertanggungjawabannya.

Dana haji menyimpan harapan masyarakat yang telah menabung dan menanti keberangkatan selama bertahun-tahun. Karena itu, penguatan lembaga pengelolanya harus membawa tujuan yang jelas: menjaga amanah dan menghadirkan manfaat secara berkelanjutan.

Kementerian Haji dan Umrah mendorong penguatan peran BPKH dalam revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Dalam *8th International Hajj Fund Forum* di Jakarta, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menekankan gagasan restricted fund, yakni dana haji diperuntukkan bagi kepentingan haji. Pemerintah juga mendorong diversifikasi investasi untuk mengurangi pemusatan risiko sekaligus membuka peluang peningkatan nilai manfaat. Pembahasan revisi tersebut masih berlangsung bersama DPR RI.

Kewenangan dan Tanggung Jawab

Penguatan kelembagaan perlu diikuti kejelasan batas kewenangan, mutu pengambilan keputusan, dan pengawasan yang efektif. Setiap ruang gerak yang diberikan harus memiliki ukuran keberhasilan serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diuji.

Diversifikasi pun perlu ditempatkan dalam kerangka kehati-hatian. Setiap pilihan pengelolaan semestinya didukung kajian yang memadai, termasuk mengenai risiko dan kesiapan menghadapi perubahan kondisi. Dengan demikian, upaya meningkatkan manfaat berjalan bersama perlindungan dana.

Jemaah sebagai Ukuran

Bagi masyarakat, arti penguatan BPKH akan terlihat dari semakin terjaganya amanah dan semakin jelasnya informasi yang diterima. Bahasa kebijakan perlu diterjemahkan menjadi penjelasan yang mudah dipahami: bagaimana dana dikelola, untuk tujuan apa, dan bagaimana pelaksanaannya diawasi.

Karena itu, revisi regulasi layak diarahkan untuk memperkuat hubungan antara kewenangan dan akuntabilitas. Kepentingan jemaah harus menjadi ukuran dalam setiap pembaruan.

Kepercayaan tumbuh ketika lembaga mampu bekerja secara cermat sekaligus terbuka terhadap evaluasi. Di situlah penguatan BPKH memperoleh maknanya: merawat harapan menuju Baitullah melalui pengelolaan yang bertanggung jawab.

REVISI UU PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI JADI MOMENTUM PERKUAT BPKH

Dana kelolaan sekitar Rp185 triliun, yang berasal dari setoran sekitar 5,8 juta peserta haji, menempatkan BPKH pada tanggung jawab besar. Pengelolaannya perlu menghasilkan manfaat sekaligus melindungi kepentingan jemaah.

Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj menilai revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 perlu membuka ruang optimalisasi investasi secara profesional. Berdasarkan catatannya, nilai manfaat meningkat dari sekitar Rp7 triliun pada 2017 menjadi Rp12 triliun pada 2025.

Meski meningkat, ia menilai pendekatan investasi berimbal hasil sekitar 6–7 persen perlu dievaluasi. Peluang keuntungan lebih tinggi harus disertai pengukuran risiko yang matang. “Optimalisasi bukan berarti mengambil risiko sebesar-besarnya,” ujarnya.

Investasi dan Akuntabilitas

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang turut menyoroti penempatan dana pada sukuk dengan imbal hasil sekitar 6,4 persen. Ia juga mendorong pengkajian ketentuan tanggung renteng yang dinilainya memengaruhi keleluasaan keputusan investasi.

Sementara itu, Mustolih mengusulkan evaluasi mekanisme pelaporan agar BPKH dapat menyampaikan laporan langsung kepada Presiden.

Berbagai usulan tersebut menegaskan bahwa penguatan investasi perlu berjalan bersama pembenahan kelembagaan. Revisi regulasi diharapkan meningkatkan manfaat secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga keamanan dana, transparansi, dan kepentingan jemaah.



MENGELOLA DANA HAJI SEDARI DINI

Bagi sebagian besar umat Islam di Indonesia, ibadah haji merupakan impian yang dipersiapkan sepanjang hidup. Namun, panjangnya antrean keberangkatan membuat persiapan tersebut tidak lagi dapat dilakukan menjelang usia pensiun. Perencanaan ibadah haji perlu dimulai sejak usia produktif, baik dari sisi kesiapan finansial maupun pemahaman mengenai pengelolaan dana haji.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, menyoroti masa tunggu yang panjang sebagai salah satu alasan pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk mempersiapkan ibadah haji lebih awal.

Di sejumlah daerah, masa tunggu keberangkatan bahkan pernah mencapai lebih dari empat dekade. Ia mencontohkan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki masa tunggu hingga 43 tahun. Setelah adanya penyesuaian kebijakan, masa tunggu tersebut disebut mengalami penurunan menjadi sekitar 26 tahun. Angka ini perlu dipahami sesuai konteks wilayah dan ketentuan keberangkatan yang berlaku.

"Waktu tunggu yang cukup lama menyebabkan persiapan haji harus dilakukan jauh-jauh hari. Jangan sampai masyarakat baru mulai mempersiapkan haji ketika sudah memasuki masa pensiun," ujar Fadlul.

Menurutnya, perencanaan sejak dini akan memberikan kesempatan bagi calon jemaah untuk menyiapkan kebutuhan finansial secara lebih terukur. Dengan masa tunggu yang panjang, pendaftaran haji juga perlu menjadi bagian dari perencanaan keuangan keluarga, bukan sekadar keputusan yang diambil ketika seseorang merasa telah menyelesaikan berbagai kebutuhan duniawinya.



"Penguatan BPKH harus bermuara pada perlindungan amanah dan kepentingan jemaah.

Rentang waktu pengelolaan yang panjang menghadirkan tanggung jawab sekaligus peluang. BPKH perlu memastikan dana jemaah dikelola secara hati-hati, dengan mempertimbangkan keamanan dana, likuiditas, risiko investasi, dan potensi imbal hasil.

“Dana yang sudah disetorkan jemaah menjadi tanggung jawab kami untuk dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan nilai manfaat. Harapannya, ketika jemaah berangkat, dana tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan biaya penyelenggaraan ibadah haji,” jelas Fadlul.

Kewenangan yang semakin kuat perlu diiringi pertanggungjawaban yang semakin jelas.

Ia mengungkapkan, secara matematis, jangka waktu pengelolaan yang panjang dapat memberikan ruang bagi pertumbuhan dana melalui investasi. Sebagai ilustrasi, apabila dana berkembang dengan tingkat imbal hasil tetap sebesar lima persen per tahun dan seluruh hasilnya diinvestasikan kembali, dana awal dapat bertumbuh menjadi sekitar 3,5 kali lipat setelah 26 tahun.

Namun, simulasi tersebut merupakan ilustrasi matematis, bukan jaminan hasil investasi. Dalam praktiknya, tingkat imbal hasil dapat berubah mengikuti kondisi pasar, sementara hasil pengelolaan dana haji juga digunakan untuk mendukung kebutuhan jemaah yang berangkat setiap tahunnya.

Karena itu, pengelolaan dana haji tidak semata-mata berorientasi pada besarnya keuntungan investasi. BPKH perlu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dana dalam jangka panjang dan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berjalan.

Pada akhirnya, panjangnya masa tunggu menjadi pengingat bahwa persiapan haji perlu dilakukan sejak dini. Bagi masyarakat, hal ini berarti membangun kebiasaan merencanakan keuangan jauh sebelum waktu keberangkatan tiba. Sementara bagi BPKH, hal tersebut menjadi amanah untuk mengelola dana jemaah secara profesional agar nilai manfaatnya dapat mendukung kebutuhan jemaah hari ini tanpa mengabaikan kepentingan jemaah pada masa mendatang.

Pengelolaan dana haji, dengan demikian, bukan sekadar perkara menempatkan dana pada instrumen investasi. Lebih dari itu, pengelolaan tersebut merupakan upaya menjaga amanah, mengelola risiko, dan memastikan keberlanjutan perjalanan ibadah bagi jutaan umat Islam Indonesia.

Dr. Fadlul Imansyah, S.E., M.M., CIFP., AAK.



01 Bantuan air untuk warga NTT



02 International Hajj Fund Forum 2026



03 Peserta Gen Z Naik Haji



04 Ruang bertanya dan berdialog



05 Air untuk keseharian



06 Gagasan untuk pengelolaan haji

BERSAMA,

MENJAGA AMANAH.
MEMBANGUN KERJA SAMA.
MEMPERLUAS MANFAAT.

Dari ruang kebijakan,
forum internasional,
hingga kehidupan masyarakat.

Ada gagasan yang dipertemukan,
keterampilan yang dikuatkan,
dan harapan yang terus dijaga.

Inilah potret kerja bersama
untuk jemaah dan kemaslahatan.

BERDAMPAK.

BPKH MAGAZINE / SEPTEMBER—OKTOBER 2026



07 Perspektif dari forum



09 Manfaat di tengah masyarakat



08 Kriya tekstil Malang



10 Program Kemaslahatan BPKH



11 Dukungan bersama mitra



12 Berbagi informasi melalui wawancara



13 Pertemuan di Komisi VIII DPR RI



14 Kerja sama dengan BIBD



15 Kolaborasi lintas lembaga



16 Pembukaan ISEF 2026



17 Diskusi dan pertukaran perspektif



18 Literasi untuk generasi muda



19 Menyampaikan informasi kepada publik



20 Pertemuan dalam IHFF



21 Pendalaman gagasan



22 Interaksi di sela kegiatan



23 Gen Z Naik Haji: belajar merencanakan



24 Sinergi antarpemangku kepentingan



25 Mempererat kemitraan



26 Kebersamaan dalam seremoni

LANGKAH MUDA

MENUJU BAITULLAH

Melalui Safari Haji di Surabaya, BPKH mengajak pelajar mengenal perencanaan keuangan haji sekaligus mengambil peran dalam menyebarkan kebaikan di ruang digital.

Cita-cita berhaji dapat tumbuh sejak bangku sekolah. Meski keberangkatan masih terasa jauh, masa muda memberi kesempatan untuk belajar menata prioritas dan membangun kebiasaan baik. Dari langkah sederhana itulah sebuah harapan dapat mulai menemukan arahnya.

Semangat tersebut dihadirkan dalam Safari Haji, Sosialisasi Literasi Keuangan Haji, dan Workshop Program Dai Sejuta Mimbar di SMA IT Al Uswah Surabaya, Jumat (4/9/2026). BPKH berkolaborasi dengan BRIN dan Yayasan Harika untuk Kemanusiaan, didukung Bank Muamalat Indonesia serta pihak sekolah.



Merencanakan sejak Muda

Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander menekankan pentingnya mempersiapkan haji melalui komitmen finansial jangka panjang.





“Semakin dini memulai, semakin besar peluang generasi muda mewujudkan cita-cita berhaji,” ujarnya.

Melalui talkshow dan tanya jawab, para siswa diperkenalkan pada layanan haji, perencanaan keuangan syariah, serta pentingnya kesiapan spiritual dan finansial. Masa tunggu yang panjang di sejumlah daerah menjadi pertimbangan untuk mulai mempersiapkan diri sejak muda.

Bagi pelajar, perencanaan dapat menjadi latihan memahami hubungan antara keinginan dan usaha. Menentukan tujuan membantu seseorang memberi arah pada kebiasaan sehari-hari. Belajar menyisihkan uang, misalnya, sekaligus melatih kesabaran dalam memperjuangkan sesuatu yang bernilai.

Menyampaikan Kebaikan lewat Layar

Kegiatan ini juga memperkenalkan Program Dai Sejuta Mimbar. Generasi muda diajak menjadi penyampai pesan kebaikan melalui konten digital yang kreatif dan dekat dengan keseharian mereka.

Ruang digital memberi kesempatan untuk belajar berbicara dengan tujuan. Sebuah unggahan dapat menjadi ajakan yang sederhana: membangun kebiasaan baik, berbagi pengetahuan, atau mengingatkan teman untuk mempersiapkan masa depan.

Pertemuan literasi keuangan haji dan dakwah digital menghadirkan dua bekal bagi pelajar: kemampuan merencanakan diri dan kemauan memberi manfaat kepada sesama. Keduanya dapat tumbuh bersama, mengiringi langkah generasi muda dalam merawat cita-cita menuju Baitullah.



PERTARUHAN KEBERLANJUTAN DANA HAJI

Dr. Sulistyowati, S.E., M.E., WMI., CFP.

Artikel ini sebelumnya telah dimuat di Media Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2026 dengan judul "Pertaruhan Keberlanjutan Dana Haji"

Musim Haji 1448 H segera tiba. Diperkirakan pada pertengahan April 2027 nanti sudah mulai pemberangkatan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia. Ritual tahunan yang selalu menjadi isu hangat ialah penentuan besaran biaya perjalanan haji.

Pada Agustus 2026 lalu, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2027 sebesar Rp107.340.172. Dari jumlah itu, jemaah haji hanya membayar biaya perjalanan ibadah haji (bipih) senilai Rp42.936.068 (40%). Sisanya, Rp64.404.103 (60%), dialokasikan dari nilai manfaat dana haji tahun berjalan yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).



Biaya haji yang diusulkan Kemenhaj tersebut melonjak 22,8% jika dibandingkan dengan di 2026 yang Rp87.409.365, yang terdiri atas Rp54.193.806 (62% dibayar jemaah) dan sisanya Rp33.215.000 (38% dari nilai manfaat tahun berjalan). Terjadi lonjakan sangat drastis pada alokasi nilai manfaat tahun berjalan antara 2026 dan usulan 2027, yakni sebesar Rp31.189.103. Kenaikan nilai alokasi nilai manfaat tahun berjalan itu, selain karena BPIH yang naik, juga karena persentase alokasi nilai manfaat tahun berjalan yang mencapai lebih dari separuh biaya.

INVESTASI KONSERVATIF

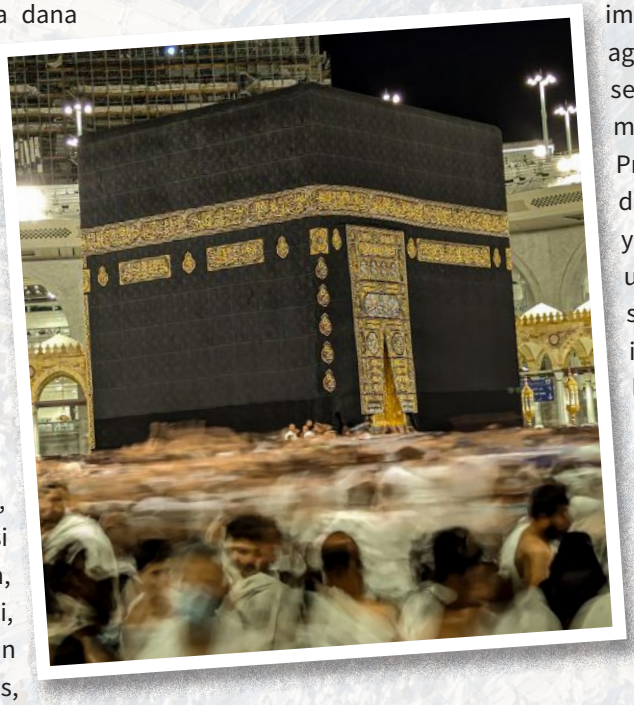
BPKH dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dan diberi tugas mengelola dana haji. Dana yang dikelola BPKH menghasilkan nilai manfaat (imbal hasil). Maksimal 5% di antaranya untuk operasional BPKH, walaupun realisasinya tidak sebesar itu. Selebihnya dimanfaatkan untuk pembiayaan jemaah haji berangkat dan dialokasikan kepada jemaah haji tunggu melalui rekening virtual masing-masing.

Manfaat dana hasil kelolaan BPKH telah dirasakan jemaah haji karena mereka tidak perlu membayar biaya perjalanan haji secara penuh. Alokasi nilai manfaat tahun berjalan dirasakan sangat meringankan jemaah. Bagi jemaah tunggu, setiap tahun saldo rekening mereka juga bertambah. Melihat realitas tersebut, para pemangku kepentingan menyadari bahwa keberlanjutan dana haji merupakan keniscayaan.

Ada dua hal yang menentukan keberlanjutan dana haji, yaitu pengelolaan dana secara profesional sehingga mendapatkan imbal hasil memadai dan besaran alokasi nilai manfaat tahun berjalan kepada jemaah haji. Profesionalitas pengelolaan dana menjadi domain BPKH, sedangkan penentuan biaya haji berikut besaran alokasi nilai manfaat tahun berjalan menjadi domain para pengambil keputusan, yakni pemerintah (Kemenhaj) dan DPR RI.

Sampai saat ini BPKH praktis sudah sembilan tahun

mengemban amanah mengelola dana haji, dan sejak beroperasi tahun 2017 selalu mendapat predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga tinggi negara yang setiap tahun mengaudit keuangan dan kinerja BPKH. Hasil audit selalu dikirimkan kepada DPR dan presiden secara periodik.



Dalam pengelolaan dananya, BPKH melakukan investasi berlandaskan prinsip syariah, kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan pelaksanaan pengawasan yang berlapis, mulai dari Dewan Pengawas, DPR, dan presiden. Setiap keputusan investasi yang diambil tidak semata-mata mempertimbangkan aspek komersial, tetapi juga keberkahan dan kemanfaatan jangka panjang bagi para jemaah haji.

Jangan sampai upaya meringankan beban jemaah berangkat melalui alokasi nilai manfaat tahun berjalan yang terlalu besar justru mengorbankan kepentingan jemaah tunggu.

Portofolio investasi dana haji sangat konservatif, yakni 70% ditempatkan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Selebihnya, 25% ditempatkan sebagai deposito di 30 bank syariah di Indonesia untuk menjaga likuiditas, dan sisanya 5% berupa investasi langsung di Bank Muamalat Indonesia dan di BPKH Limited, sebuah usaha yang berbasis di Arab Saudi.

Tak sedikit yang mendorong agar BPKH lebih agresif dalam berinvestasi supaya mendapat imbal hasil yang lebih tinggi. Namun, justru di sinilah kehati-hatian menjadi mantra yang harus dipegang teguh. Ketidakhati-hatian menjadi ancaman bagi keberlanjutan dana haji.

Investasi BPKH yang konservatif bukan karena intensi pengurus, melainkan karena undang-undang secara imperatif memberi rambu-rambu agar investasi dana haji dilakukan secara hati-hati, rendah risiko, dan mempertimbangkan likuiditas. Prinsip konservatif investasi dana haji merupakan prinsip yang berlaku secara universal untuk setiap dana publik, karena setiap dana publik strategi investasinya menganut falsafah liability driven investing.

Kita perlu belajar dari kasus tragedi Lembaga Tabung Haji (LTH) Malaysia. LTH yang dulu menjadi tolok ukur pengelolaan dana haji dunia nyaris bangkrut sehingga harus di-bail out senilai 19,9 miliar ringgit (Rp87,4 triliun). Salah satu penyebabnya ialah investasi agresif berisiko tinggi di bidang properti, perkebunan, perminyakan, dan perhotelan. Penyebab lainnya ialah intervensi politik dari pejabat pemerintah dan rekayasa keuangan agar diperoleh laba besar.

ALOKASI NILAI MANFAAT TAHUN BERJALAN

Peran pemerintah dan DPR RI tak kalah besar dalam menentukan keberlanjutan dana haji. Dari pemerintah dan DPR-lah keluar kesepakatan besaran biaya perjalanan haji berikut besaran alokasi nilai manfaat tahun berjalan kepada jemaah haji. Seperti disampaikan di atas, usulan alokasi nilai manfaat tahun berjalan biaya haji sebesar Rp64.404.103 per jemaah atau 60% biaya haji perlu dipertimbangkan lebih matang. Tak hanya terkait dengan keadilan bagi calon jemaah haji tunggu, tetapi juga keberlanjutan dana haji.

Pada 2027 nanti, jumlah jemaah haji sekitar 221.000, yang terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Jika alokasi nilai manfaat tahun berjalan seperti tertera di atas diberikan kepada jemaah reguler, BPKH perlu mengalokasikan sekitar Rp13,1 triliun dari nilai



manfaat untuk jemaah haji reguler.



Perlu diketahui, anggaran tahunan BPKH 2026 yang telah disetujui DPR, dana kelolaan diperkirakan Rp189,6 triliun, sedangkan target nilai manfaat Rp12,3 triliun. Jika alokasi nilai manfaat tahun berjalan untuk jemaah haji 2027 sebesar 60%, nilai manfaat yang diperoleh tidak mencukupi sehingga akan menggerus dana kelolaan sebesar Rp800 miliar (Rp13,1 triliun – Rp12,3 triliun). Jemaah haji tunggu yang setiap tahun mendapat bagian nilai manfaat turut menjadi korban.



Jika hal itu terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, pada suatu waktu dana kelolaan haji akan habis. Apalagi jika pemerintah Arab Saudi memberikan kuota tambahan seperti tahun 2024 sebanyak 20.000 jemaah, total kebutuhan alokasi nilai manfaat tahun berjalan semakin besar dan pada gilirannya akan mempercepat penggerusan dana kelolaan.

Pada prinsipnya, dana kelolaan haji perlu diperlakukan sebagai dana berjangka panjang. Karena itu, nilai pokok yang berasal dari setoran awal jemaah sebesar Rp25 juta per orang harus dijaga agar tidak tergerus. Mengapa? Karena di situ ada hak 5,8 juta calon jemaah yang terdapat dalam daftar antrean untuk berangkat. Jangan sampai upaya meringankan beban jemaah berangkat melalui alokasi nilai manfaat tahun berjalan yang terlalu besar justru mengorbankan kepentingan jemaah tunggu.

Secara regulasi, BPKH tidak diberi mandat untuk menetapkan alokasi nilai manfaat tahun berjalan. Besaran alokasi nilai manfaat tahun berjalan bagi jemaah berangkat merupakan keputusan pemerintah dan DPR yang harus ditetapkan dengan prinsip tidak mengganggu keberlanjutan dana haji di masa depan. Mandat utama BPKH ialah mengembangkan dan mengelola dana haji secara optimal dan hasil investasi didistribusikan secara proporsional kepada masing-masing jemaah.

Di sisi lain, sesuai Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VIII Nomor 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024, hasil investasi dana haji tidak boleh digunakan untuk membiayai jemaah haji lain. Artinya, dalam tataran ideal, semua hasil investasi harus dibagi rata kepada semua jemaah haji yang sudah mendaftar. Meskipun saat ini fatwa tersebut belum dapat dilaksanakan secara penuh, paling tidak harus semakin didekati. Atau dimulai dulu dengan alokasi nilai manfaat tahun berjalan yang terarah: semakin tinggi kemampuan finansial jemaah, semakin kecil alokasi nilai manfaat tahun berjalan.

Keberlanjutan ibadah haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang mampu, baik secara fisik maupun finansial. Kemampuan finansial yang kuat berarti alokasi nilai manfaat tahun berjalan yang diberikan kepada jemaah seharusnya seminimal mungkin.

Dalam beberapa studi, demi keberlanjutan dana haji, perbandingan antara biaya yang dibayarkan jemaah dan alokasi nilai manfaat tahun berjalan yang diberikan ialah 60:40, artinya jemaah membayar 60% dan alokasi nilai manfaat tahun berjalan 40%. Dengan porsi seperti itu, BPKH mempunyai keleluasaan dalam mengelola dana dan menjalankan program-programnya. Perbandingan itu sekaligus untuk mengantisipasi biaya haji yang setiap tahun hampir selalu naik.

Dari hasil kajian penulis, agar keberlanjutan dana haji semakin terjaga, alokasi nilai manfaat tahun berjalan dapat diberikan maksimal sebesar 20% dari nilai manfaat. Selebihnya selain untuk operasional BPKH dan dibagi kepada jemaah tunggu, juga untuk dana cadangan guna menutupi risiko yang berada di luar kendali internal, khususnya terkait risiko investasi. Dana cadangan ini sekaligus menjadi penyangga untuk menjamin keberlanjutan layanan lintas generasi.

BPKH perlu terus meningkatkan imbal hasil secara terukur, tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kebutuhan likuiditas.

Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar besaran alokasi nilai manfaat tahun berjalan haji 2027, melainkan keberlanjutan dana haji dan hak jutaan jemaah yang masih menunggu giliran berangkat.

HIKMAH KRISIS LEMBAGA TABUNG HAJI

Amri Yusuf, S.E., Ak., CA., M.M., CACP.

Artikel ini sebelumnya telah dimuat di Harian Kompas pada tanggal 18 September 2026 dengan judul "Hikmah Krisis Lembaga Tabung Haji

Tepat di medio Agustus 2026, rakyat Malaysia dihebohkan oleh berita musibah keuangan yang menimpa Lembaga Tabung Haji atau LTH. Skandal keuangan LTH menjadi atensi publik setelah Pemerintah Malaysia membuka laporan investigasi Komisi Penyelidikan Kerajaan (Royal Commission of Inquiry/RCI) kepada publik pada akhir Juli 2026. Laporan RCI yang diterbitkan pada 30 Agustus 2022 membongkar rangkaian skandal salah kelola keuangan, manipulasi akuntansi, dan intervensi politik selama 2014–2020.

Kasus manipulasi keuntungan fiktif 4,8 miliar ringgit Malaysia dan salah urus investasi itu nyaris membangkrutkan LTH. Temuan itu memaksa Pemerintah Malaysia melakukan program penyelamatan (bailout) senilai 19,9 miliar ringgit Malaysia.



Hasil investigasi independen RCI menyebutkan faktor-faktor penyebab bersifat akumulatif dan sistemik. Pertama, intervensi politik dari pejabat eksekutif pemerintah membuat tata kelola LTH tak berdaya. Celah intervensi terjadi karena Akta Tabung Haji 1995 (Akta 535) memberi kekuasaan kepada menteri untuk menunjuk pimpinan dan pengurus LTH berdasarkan patronase dan preferensinya.

Kedua, LTH terlibat dalam investasi agresif dan berisiko tinggi di berbagai sektor, seperti properti, perkebunan, perminyakan, dan perhotelan. RCI menilai banyak ekspansi bisnis gagal sehingga meningkatkan risiko, terutama ketika LTH tak punya keahlian dan tata kelola memadai untuk semua sektor itu. Investasi agresif ini ditengarai berkorelasi dengan intervensi eksekutif pemerintah.

Ketiga, LTH melakukan pembayaran dividen berlebihan dan tidak berdasarkan hasil kinerja keuangan riil (unsustainable hibah). Demi pencitraan politik, pengurus LTH memaksakan pembagian bonus dan dividen tahunan tinggi kepada deposan. Diduga, payout tinggi itu diambil dari dana tabungan nasabah baru, bukan pendapatan investasi yang sebenarnya.

Keempat, LTH memanipulasi akuntansi ekstrem (creative accounting). LTH melaporkan keuntungan 3,4 miliar ringgit Malaysia pada 2017, padahal audit RCI mengungkap institusi sebenarnya merugi 1,4 miliar ringgit Malaysia akibat kegagalan 14 proyek investasi, termasuk sewa hotel di Arab Saudi.

Untuk mengatasi problematika akut tersebut, RCI dan Pemerintah Malaysia menggulirkan program restrukturisasi dan reformasi total tata kelola LTH. Pertama, reformasi tata kelola dan penguatan independensi LTH, termasuk merevisi Akta 535 dan menghapus celah intervensi politik terhadap tata kelola korporat.

Kedua, tata kelola investasi diperbaiki dan diarahkan agar lebih profesional, hati-hati, dan tidak lagi berinvestasi pada instrumen berisiko tinggi. Ketiga, pemisahan tegas antara fungsi operasional haji yang diawasi Menteri Agama dan manajemen keuangan haji yang diawasi

Menteri Keuangan. Keempat, rasionalisasi finansial dan sistem hajj financial support (hafis) atau subsidi untuk jemaah haji.

Pelajaran bagi BPKH

Mencermati langkah reformasi pertama sampai ketiga di LTH, Indonesia sudah melakukannya sejak 2014 melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. UU itu menegaskan pengurus Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dipilih dari kalangan profesional serta diawasi secara internal oleh dewan pengawas dan secara eksternal oleh DPR, BPK, dan OJK. Indonesia juga memisahkan operasional penyelenggaraan haji dengan pengelolaan keuangan haji. Dalam konteks investasi, BPKH hanya diperkenankan berinvestasi pada instrumen aman dan likuid.

Musibah LTH harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola dana haji dan merasionalisasi subsidi biaya haji.

Yang menarik adalah langkah LTH mereformasi dan merasionalisasi sistem keuangan dan pembiayaan jemaah haji. Ada tiga langkah reformasi rekomendasi dari RCI agar eksistensi LTH secara keuangan lebih berkelanjutan.

Pertama, RCI mengusulkan kenaikan drastis setoran awal pendaftaran haji dari 1.300 ringgit Malaysia yang berlaku sejak 2010 menjadi 12.980 ringgit Malaysia pada 2022, setara biaya paket pelayanan minimum haji di Saudi. Berdasarkan informasi pimpinan LTH, rencana kenaikan setoran awal ini sudah diproses dan menunggu persetujuan Kementerian terkait. Aturan itu dibuat untuk memastikan LTH memiliki likuiditas uang tunai riil yang mencukupi dan memitigasi risiko defisit akibat biaya operasional haji yang terus meningkat.



Kedua, mengubah secara fundamental kebijakan subsidi (hafis). Pemerintah Malaysia menghapus subsidi sama rata untuk semua jemaah dan menggantinya dengan bantuan berdasarkan kelompok jemaah. Kebijakan ini efektif sejak 2022 sebagai dampak temuan RCI. Bertahun-tahun, hafis menyedot kas LTH dalam jumlah besar dan merugikan deposan atau jemaah yang belum berangkat.

Pembagian subsidi dilakukan berdasarkan tiga kategori ekonomi. Kelompok B40, masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendapatan rumah tangga di bawah 5.860 ringgit Malaysia per bulan, mendapat subsidi maksimal 18.300 ringgit Malaysia atau 55 persen dari total biaya haji 33.300 ringgit Malaysia. Jemaah membayar 15.000 ringgit Malaysia. Kelompok M40 dengan pendapatan rumah tangga 5.860 ringgit Malaysia hingga 12.679 ringgit Malaysia mendapat hafis 9.800 ringgit Malaysia atau 29 persen dan membayar 23.500 ringgit Malaysia. Adapun T20 dengan pendapatan di atas 12.680 ringgit Malaysia tidak mendapat subsidi dan wajib membayar penuh 33.300 ringgit Malaysia sesuai syarat istitha'ah.

Ketiga, jemaah pengganti atau yang mengajukan percepatan akibat jemaah lain gagal berangkat pada umumnya tidak mendapat subsidi dan wajib membayar biaya riil 33.300 ringgit Malaysia. LTH menerapkan prinsip istitha'ah secara ketat. Jemaah pengganti tetap bisa mendapatkan subsidi jika memenuhi kriteria tertentu, yakni pendamping suami atau istri yang sudah terpilih dalam kuota utama, pendamping orang tua atau orang lansia, atau pendamping jemaah berkebutuhan khusus. Di luar ketiga kriteria itu, jemaah pengganti tidak mendapatkan subsidi.

Selama puluhan tahun, LTH Malaysia dikagumi secara global sebagai pelopor pengelolaan dana haji yang profesional dan inklusif. LTH pernah berdiri sebagai salah satu institusi keuangan syariah terintegrasi terbesar dan model percontohan bagi banyak negara Muslim.

Bencana dana haji yang dialami LTH, dipicu kelemahan tata kelola, intervensi politik yang masif, investasi agresif, dan subsidi biaya haji yang tinggi, harus menjadi pelajaran bagi Indonesia. Musibah LTH harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola dana haji dan merasionalisasi subsidi biaya haji. Rasionalisasi subsidi yang dimulai sejak 2023 dengan menurunkannya secara bertahap 5 persen setiap tahun perlu dipertahankan.

Indonesia seyogianya mulai mempertimbangkan skema subsidi berdasarkan target jemaah dengan membagi desil 1-10 yang saat ini dimiliki Indonesia menjadi tiga kategori seperti Malaysia.



TRANSFORMASI DIGITAL UNTUK MENJAGA AMANAH JEMAAH

BPKH mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan layanan, dan menjaga kepercayaan jemaah.

Pengelolaan dana haji membutuhkan sistem yang mampu mengikuti besarnya tanggung jawab. Ketelitian pencatatan, kecepatan membaca risiko, dan kemudahan akses informasi menjadi kebutuhan yang semakin penting.

Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin menyampaikan bahwa dana yang dikelola BPKH mencapai sekitar Rp184 triliun. Dalam Hajj Fund Forum ISEF 2026 di Jakarta, Kamis (15/10/2026), ia menekankan peran transformasi digital dalam memperkuat pengawasan berbasis data.

Menurut Firmansyah, digitalisasi dapat membantu pengelolaan portofolio, mendukung deteksi dini risiko, dan meningkatkan transparansi. Penerapannya perlu disertai integritas kelembagaan, kepatuhan syariah, keamanan siber, serta perlindungan data jemaah.

Teknologi untuk Pengelolaan dan Pelayanan

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung turut mendorong penggunaan kecerdasan buatan atau AI secara bertanggung jawab. Teknologi dinilai dapat membantu pemantauan investasi, mendeteksi transaksi tidak wajar, dan mempercepat pelaporan.

Manfaatnya juga menjangkau pelayanan. Administrasi yang lebih sederhana dan informasi yang mudah diakses dapat membantu jemaah memahami perjalanan keuangannya. Sementara itu, konektivitas digital berpeluang memperkuat hubungan antarlayanan dalam ekosistem haji, termasuk akomodasi, transportasi, konsumsi, dan kesehatan.

Kepercayaan sebagai Tujuan

Bagi jemaah, kemajuan teknologi akan terasa ketika layanan semakin mudah dipahami dan digunakan. Karena itu, transformasi digital perlu memiliki ukuran keberhasilan yang dekat dengan kebutuhan mereka.

Setiap pembaruan sistem membawa tanggung jawab untuk menjaga informasi sekaligus memastikan keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Teknologi membantu pekerjaan manusia; ketelitian dan integritas pengelola tetap menentukan mutu pelaksanaannya.



Di balik dana haji terdapat tabungan dan harapan banyak keluarga. Transformasi digital memperoleh makna ketika mampu membantu menjaga amanah tersebut melalui pengelolaan yang semakin tertib, terbuka, dan responsif.

BPKH SALURKAN 7.700 LITER AIR BERSIH

UNTUK PENYINTAS GEMPA NTT



Rencana alam kerap menyisakan tantangan yang tidak berhenti ketika guncangan mereda. Bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), pemenuhan kebutuhan dasar menjadi salah satu hal penting dalam menjalani masa pemulihan. Di tengah situasi tersebut, ketersediaan air bersih menjadi kebutuhan mendesak untuk menunjang aktivitas sehari-hari serta menjaga kebersihan dan kesehatan keluarga.





Merespons kebutuhan itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Program Kemaslahatan, bersama Mitra Kemaslahatan Rumah Zakat, menyalurkan bantuan sebanyak 7.700 liter air bersih kepada masyarakat terdampak gempa bumi di Desa Woekokak, Kelurahan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, pada 2 September 2026.

Penyaluran tersebut merupakan bagian dari Program Tanggap Bencana yang ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama masa darurat dan pemulihan pascabencana. Bantuan air bersih diharapkan dapat meringankan beban warga yang masih menghadapi keterbatasan akibat dampak gempa.

Air Bersih untuk Kebutuhan Sehari-hari

Dalam situasi kebencanaan, air bersih memiliki peran penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Kebutuhannya tidak hanya berkaitan dengan konsumsi, tetapi juga mencakup kebersihan diri, sanitasi, serta berbagai aktivitas rumah tangga.

Keterbatasan akses terhadap air bersih dapat menambah beban masyarakat yang tengah berupaya memulihkan kehidupan setelah bencana. Oleh karena itu, penyediaan air bersih menjadi salah satu bentuk dukungan kemanusiaan yang dapat membantu warga menghadapi kondisi darurat. Bantuan 7.700 liter air bersih yang disalurkan melalui kolaborasi BPKH dan Rumah Zakat diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Kehadiran bantuan ini juga menjadi wujud kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.

Amer, selaku Kepala Posko setempat, menyampaikan apresiasinya atas bantuan air bersih yang diberikan kepada warga terdampak.

“Kami sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada donatur Rumah Zakat atas bantuan air bersih yang diberikan kepada masyarakat. Bantuan ini sangat membantu warga yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana,” ungkapnya.

Apresiasi tersebut menggambarkan pentingnya dukungan berbagai pihak dalam penanganan dampak bencana. Kolaborasi antara lembaga pengelola dana sosial, mitra kemaslahatan, dan pihak di lapangan menjadi bagian dari upaya menghadirkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi untuk Kemaslahatan Umat

Melalui Program Kemaslahatan, BPKH berupaya menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk penanganan kebutuhan dasar dalam situasi bencana. Kerja sama dengan Rumah Zakat menjadi bagian dari upaya penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.





MOMENTUM 100 TAHUN GONTOR, BPKH KUCURKAN RP300 JUTA UNTUK PENDIDIKAN

Menyelesaikan pendidikan membutuhkan ketekunan dan kesempatan yang terus terjaga. Ketika persoalan biaya menghambat perkuliahan, dukungan yang hadir dapat membantu mahasiswa mempertahankan cita-citanya.

Melalui Program Kemaslahatan, BPKH bekerja sama dengan Baitulmaal Muamalat (BMM) menyalurkan bantuan Rp300 juta kepada 50 mahasiswa Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor. Penyerahan simbolis berlangsung dalam Global Islamic Holistic Education Summit (GIHES) 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (5/9/2026), dalam momentum menyambut 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor.



Mendukung Keberlanjutan Studi

Bantuan ditujukan kepada mahasiswa aktif S1 yang menghadapi hambatan pembiayaan, termasuk risiko menunda kuliah, mengambil cuti akademik, atau putus studi. Penyaluran dilakukan setelah verifikasi, dengan dana ditransfer ke rekening masing-masing penerima melalui pihak kampus.



BPKH dan UNIDA Gontor juga menandatangani nota kesepahaman yang mencakup pendidikan, penelitian, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

"Kerja sama ini diharapkan membawa berkah bagi umat muslim dan kemanusiaan secara nasional maupun global," ujar Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah.

Manfaat yang Terus Bertumbuh

Bagi mahasiswa, kesempatan melanjutkan kuliah berarti ruang untuk memperdalam ilmu, mengembangkan kemampuan, dan mempersiapkan masa depan. Dukungan pendidikan juga dapat menjadi penguat semangat ketika perjalanan akademik menghadapi kesulitan.

Di tengah momentum seabad Gontor, kolaborasi ini membawa pesan tentang pentingnya menjaga kesempatan belajar. Kepedulian terhadap pendidikan dapat tumbuh menjadi manfaat yang lebih luas ketika para penerimanya kelak membagikan pengetahuan dan berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, bantuan pendidikan menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk merawat harapan agar mahasiswa dapat menuntaskan studi dan membawa bekal ilmunya ke tengah masyarakat.

KLINIK LEBIH LAYAK, MANFAAT BAGI MAHASISWA DAN PASIEN



Melalui Program Kemaslahatan, BPKH mendukung renovasi dan perluasan Klinik Integrasi FKG UI untuk memperkuat pendidikan sekaligus pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

Di ruang praktik klinis, mahasiswa kedokteran gigi mempertemukan pengetahuan dengan pengalaman merawat pasien. Fasilitas yang memadai menjadi bagian penting dalam mendukung proses belajar sekaligus menghadirkan pelayanan yang nyaman bagi masyarakat.

BPKH mendukung kebutuhan tersebut melalui Program Kemaslahatan Renovasi Perluasan Klinik Integrasi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia (FKG UI). Program dilaksanakan bersama Baitulmaal Muamalat sebagai mitra pelaksana, dengan serah terima berlangsung di Aula FKG UI Salemba, Rabu (9/9/2026).

Memperkuat Pembelajaran Klinis

Dekan FKG UI Prof. drg. Lisa Rinanda Amir menjelaskan bahwa perluasan klinik membantu memperbaiki perbandingan jumlah mahasiswa dengan ketersediaan dental unit atau perangkat pelayanan kedokteran gigi. Fasilitas ini diharapkan mendukung kelancaran pendidikan profesi dokter gigi sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin menekankan pentingnya manfaat program bagi kedua kelompok tersebut.

“Yang lebih penting dari angka-angka tersebut adalah manfaat yang akan dirasakan oleh mahasiswa dan pasien,” ujarnya.

BPKH berharap fasilitas yang telah direnovasi dapat dirawat dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung lahirnya dokter gigi yang kompeten, berintegritas, dan memiliki kepedulian sosial.

Kemaslahatan yang Terus Tumbuh

Dukungan terhadap fasilitas pendidikan kesehatan memiliki jangkauan manfaat yang panjang. Mahasiswa memperoleh ruang untuk mengembangkan keterampilan, sementara pasien menjadi bagian dari pelayanan yang sekaligus mendukung proses pendidikan.

Keberlanjutan manfaat itu membutuhkan pemeliharaan dan penggunaan yang bertanggung jawab. Fasilitas yang terjaga akan terus mendukung kegiatan belajar serta pelayanan dari waktu ke waktu.

Kolaborasi BPKH, Baitulmaal Muamalat, dan FKG UI memperlihatkan bagaimana kepedulian dapat diwujudkan melalui sarana yang digunakan bersama. Dari ruang klinik, kemaslahatan diharapkan tumbuh melalui ilmu, keterampilan, dan pengabdian kepada masyarakat.







BPKH DORONG 50 UMKM KRIYA TEKSTIL MALANG NAIK KELAS

Keterampilan mengolah tekstil menyimpan peluang untuk membangun penghidupan. Agar peluang itu berkembang, pelaku usaha membutuhkan peralatan, pengetahuan, serta teman berdiskusi saat menghadapi tantangan produksi.



Melalui Program Kemaslahatan, BPKH mendukung 50 pelaku UMKM kriya tekstil di Kota Malang, Jawa Timur. Program yang dipublikasikan pada 25 September 2026 ini dilaksanakan bersama Baitulmaal Muamalat (BMM) dan Yayasan Pelanusa Singhasari.

Mendampingi Langkah Usaha

Peserta memperoleh pelatihan pengembangan produk, bantuan peralatan, dan bahan baku. Dukungan dilanjutkan dengan pendampingan selama dua bulan, muka, satu konsultasi daring, serta dua kunjungan usaha.

Pendampingan membantu peserta menerapkan hasil pelatihan sesuai kebutuhan usahanya. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh dapat diuji dan dikembangkan dalam kegiatan produksi sehari-hari.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati menekankan bahwa program ini diarahkan untuk memperkuat keterampilan dan kapasitas agar penerima manfaat mampu mengembangkan usaha secara mandiri.

Dari Dana Abadi Umat

Program tersebut bersumber dari nilai manfaat Dana Abadi Umat (DAU), dengan tujuan mendorong produk kriya tekstil yang berkualitas, inovatif, bernilai budaya, dan mampu menjangkau pasar lebih luas.





Bagi pelaku usaha, kesempatan belajar dan mencoba menjadi bekal untuk melangkah lebih percaya diri. Peralatan membantu proses produksi, sementara pendampingan memberi ruang untuk mengevaluasi hasil dan mencari jalan keluar ketika muncul kesulitan.

“Ketika usaha berkembang, peningkatan ekonomi juga dapat dirasakan oleh keluarga dan lingkungan di sekitarnya,” ujar Sulistyowati.

Dari keterampilan yang terus diasah, harapan akan usaha yang lebih kuat dapat tumbuh. Di situlah kemaslahatan menemukan bentuknya: membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membangun kemandirian melalui karya.





MENEBAR KEBAIKAN DARI MIMBAR DIGITAL

Program Dai Sejuta Mimbar mengajak generasi muda menyampaikan pesan keislaman secara kreatif dan bertanggung jawab, sekaligus mempersiapkan haji sejak dini.

Sebuah pesan kebaikan dapat hadir melalui video singkat, percakapan dalam siniar, atau unggahan yang mengajak orang lain belajar. Bagi generasi muda, ruang digital membuka kesempatan untuk berkarya sekaligus memberi manfaat kepada sesama.

Semangat tersebut diusung BPKH bersama BRIN dan Yayasan Harika untuk Kemanusiaan melalui Program Dai Sejuta Mimbar. Peluncurannya berlangsung di Auditorium Gedung B.J. Habibie, BRIN, Jakarta, Jumat (16/10/2026).

Kreatif dan Bertanggung Jawab

Anggota Badan Pelaksana BPKH Harry Alexander mengajak generasi muda mengambil peran dalam dakwah digital dengan tetap menjaga kualitas pesan.

"Konten dakwah tidak hanya perlu kreatif dan menarik, tetapi juga harus memiliki substansi yang kuat, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Kepala BRIN Arif Satria turut menekankan pentingnya kredibilitas informasi. Menurutnya, keberhasilan dakwah digital perlu dinilai melalui manfaat dan dampak yang dihasilkan.

Menyiapkan Langkah Menuju Baitullah

Dai Sejuta Mimbar melengkapi Program Haji Muda yang mendorong literasi haji dan keuangan. Generasi muda diajak membangun kebiasaan menabung, memperoleh informasi yang tepat, serta menyiapkan kemampuan spiritual dan finansial sesuai kondisi masing-masing.

Kedua bekal tersebut dapat tumbuh bersama: merencanakan perjalanan ibadah dan belajar menyampaikan pengetahuan dengan baik. Ketika membuat konten, anak muda juga memiliki kesempatan untuk memperdalam pemahamannya sebelum membagikannya kepada orang lain.

Di tengah derasnya arus informasi, ketelitian menjadi bagian penting dari kreativitas. Memeriksa sumber, memahami konteks, dan memilih bahasa yang santun membantu sebuah pesan diterima dengan lebih baik.

Dari layar yang dekat dengan keseharian, generasi muda dapat memulai kontribusinya—mengajak belajar, merawat harapan menuju Baitullah, dan menyebarkan kebaikan melalui karya.





Melalui Dai Sejuta Mimbar, kami ingin membuka ruang bagi generasi muda untuk mengambil peran dalam menyebarkan pesan kebaikan melalui platform digital


BPKH
Badan Pengelola Keuangan Haji
BRIN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
LAUNCHING DAN SOSIALISASI PROGRAM
DAI SEJUTA MIMBAR
Generasi Muda Sebagai Penerus Dakwah Berbasis Platform Digital
Upload
Konten
Terbaikmu
Prof. Dr. Arif Satria S.P., M.Si.
Harry Alexander S.H., M.H., LL.M
Sejuta Mimbar



SISTEM DIGITAL HAJI DAN UMRAH SAUDI BERALIH 100 PERSEN KE CLOUD

Setelah 24 tahun menjadi fondasi layanan digitalnya, Hajj and Umrah Information Center milik Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kini sepenuhnya beralih ke teknologi cloud computing. Transformasi ini menandai berakhirnya penggunaan infrastruktur teknologi tradisional dan memasuki babak baru ekosistem digital Haji dan Umrah yang lebih fleksibel, terintegrasi, dan siap dikembangkan.



Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, secara resmi meluncurkan tahap penyelesaian migrasi 100 persen Hajj and Umrah Information Center ke cloud computing. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat kesiapan infrastruktur teknologi, memastikan keberlangsungan layanan (business continuity), sekaligus meningkatkan efisiensi layanan digital bagi jamaah.

Kementerian menyebut transformasi tersebut sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem digital yang lebih maju, sejalan dengan Saudi Vision 2030 dan Pilgrim Experience Program. Teknologi tidak lagi ditempatkan sekadar sebagai pendukung administrasi, tetapi menjadi salah satu fondasi untuk meningkatkan kualitas pengalaman jamaah sejak sebelum keberangkatan hingga menyelesaikan rangkaian ibadah.

Perubahan ini memiliki skala yang cukup besar. Hajj and Umrah Information Center melayani lebih dari 20 juta jamaah Haji dan Umrah setiap tahun, mendukung lebih dari 51 juta pengguna dalam ekosistem Nusuk, menyediakan lebih dari 500 layanan digital, serta terhubung dengan lebih dari 70 entitas lokal dan internasional.

Produk digital yang berada dalam ekosistem tersebut antara lain Hajj and Umrah E-Track, aplikasi Nusuk, dan Nusuk Card. Dengan demikian, migrasi ke cloud bukan sekadar perpindahan tempat penyimpanan data, melainkan perubahan fondasi teknologi yang menopang berbagai layanan dan pertukaran informasi dalam ekosistem Haji dan Umrah.

Berbeda dengan infrastruktur tradisional yang kapasitasnya relatif terikat pada perangkat fisik tertentu, sistem cloud memungkinkan sumber daya komputasi disesuaikan



dengan kebutuhan.

Hal ini menjadi penting dalam penyelenggaraan Haji. Kebutuhan terhadap sistem digital dapat meningkat sangat cepat ketika jutaan jamaah berada di Arab Saudi pada periode yang sama. Infrastruktur yang lebih fleksibel memungkinkan kapasitas sistem disesuaikan dengan lonjakan kebutuhan tersebut.

Dengan fondasi cloud, pengembangan layanan baru juga dapat dilakukan tanpa harus selalu membangun infrastruktur fisik dari awal. Kementerian dapat mengembangkan, menguji, dan mengintegrasikan berbagai layanan digital dengan lebih efisien.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut membuka ruang bagi ekosistem layanan Haji dan Umrah yang semakin terintegrasi.

Cloud computing juga dapat menjadi fondasi bagi pemanfaatan teknologi lain, termasuk kecerdasan buatan (AI), analitik data, dan Internet of Things (IoT).

Data dari berbagai layanan yang terhubung dapat dianalisis untuk menghasilkan informasi yang lebih cepat dan akurat. Misalnya, data pergerakan jamaah, kebutuhan layanan, kondisi operasional, maupun pola penggunaan aplikasi dapat digunakan untuk membantu penyelenggara memahami situasi di lapangan secara lebih cepat.

Dalam konteks Haji yang melibatkan jutaan orang, kemampuan tersebut dapat mendukung sistem yang lebih prediktif, bukan hanya responsif.

Sebagai contoh, data historis dan informasi secara real time dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi potensi kepadatan di suatu lokasi, memperkirakan kebutuhan transportasi, mengoptimalkan distribusi layanan, atau memberikan peringatan lebih dini ketika terjadi gangguan operasional.

Dengan demikian, cloud computing dapat menjadi lapisan teknologi yang memungkinkan berbagai teknologi baru bekerja di atasnya.



MENYIAPKAN WAJAH HAJI MASA DEPAN DARI MAKKAH

Makkah kembali menjadi ruang bertemunya gagasan tentang masa depan penyelenggaraan Haji. Pada 2–3 September 2026, Umm Al-Qura University menggelar *26th Scientific Forum for Hajj, Umrah and Visit Research* di kampusnya di Makkah. Berada di bawah patronase Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, forum ini mengusung tema "*Excellence and Integration in the Hajj and Umrah Services System*".

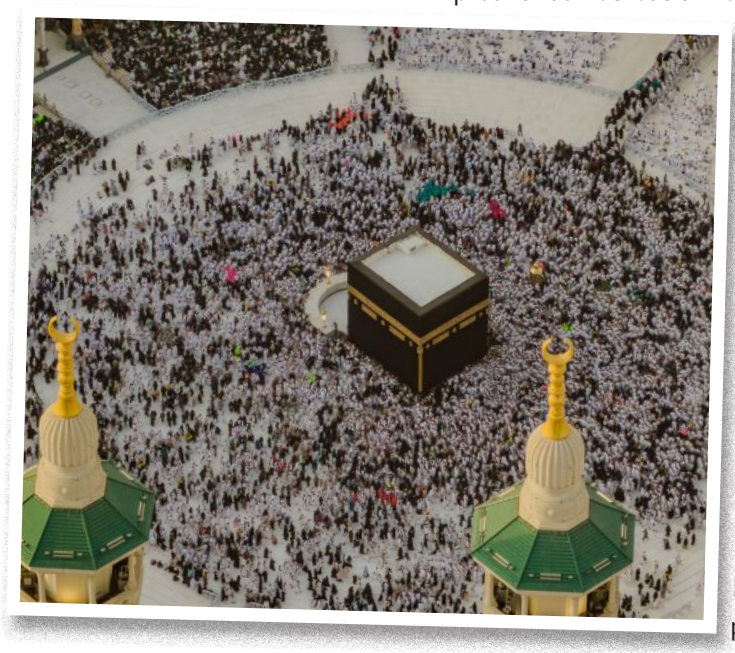


Forum tersebut mempertemukan peneliti, akademisi, pakar, pengambil kebijakan, serta penyedia layanan untuk membahas hasil penelitian, inovasi, dan praktik terbaik dari dalam maupun luar Arab Saudi. Lebih dari sekadar forum akademik, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem Haji dan Umrah yang semakin terintegrasi dan mampu menjawab tantangan penyelenggaraan di masa mendatang.

Salah satu perhatian utama forum adalah pentingnya integrasi kelembagaan. Penyelenggaraan Haji melibatkan banyak pihak dengan fungsi yang berbeda, mulai dari layanan kesehatan, transportasi, akomodasi, keamanan, pengelolaan kerumunan, hingga layanan digital. Karena itu, koordinasi antarlembaga menjadi salah satu kunci untuk memastikan setiap bagian dari perjalanan jamaah dapat berjalan secara selaras.



Pendekatan tersebut diarahkan bukan hanya untuk memperbaiki layanan yang sudah ada, tetapi juga membangun pola pengambilan keputusan yang lebih proaktif dan berbasis



bukti. Penelitian dan data diharapkan dapat membantu para pemangku kepentingan membaca berbagai kemungkinan, mengidentifikasi risiko lebih awal, serta menentukan respons yang tepat sebelum persoalan berkembang menjadi gangguan layanan.

Tema integrasi juga terlihat dalam pembahasan mengenai data *governance* dan pertukaran informasi. Dalam ekosistem Haji yang melibatkan jutaan jamaah dan berbagai layanan, ketersediaan data saja tidak cukup. Data perlu dikelola, dibagikan, dan dimanfaatkan secara tepat agar dapat mendukung koordinasi serta meningkatkan efisiensi operasional di berbagai titik layanan.

Forum ini juga memberikan perhatian pada keberlanjutan operasional dalam situasi darurat. *Business continuity* dan *emergency planning* menjadi bagian penting pembahasan, termasuk model penilaian risiko, kesiapan institusi, rencana respons dan pemulihan, hingga koordinasi pimpinan ketika terjadi krisis. Pendekatan tersebut diperlukan untuk memastikan layanan-layanan kritis tetap berjalan dalam berbagai kondisi.

Di sisi lain, perkembangan teknologi menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembicaraan mengenai masa depan Haji. Berbagai sesi dan lokakarya membahas transformasi digital, kecerdasan buatan *(artificial intelligence)*, pengelolaan kerumunan, layanan kesehatan, logistik, hingga keberlanjutan lingkungan. Teknologi ditempatkan bukan sekadar sebagai alat digitalisasi, melainkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas layanan dan membantu menghadirkan solusi atas persoalan nyata di lapangan.

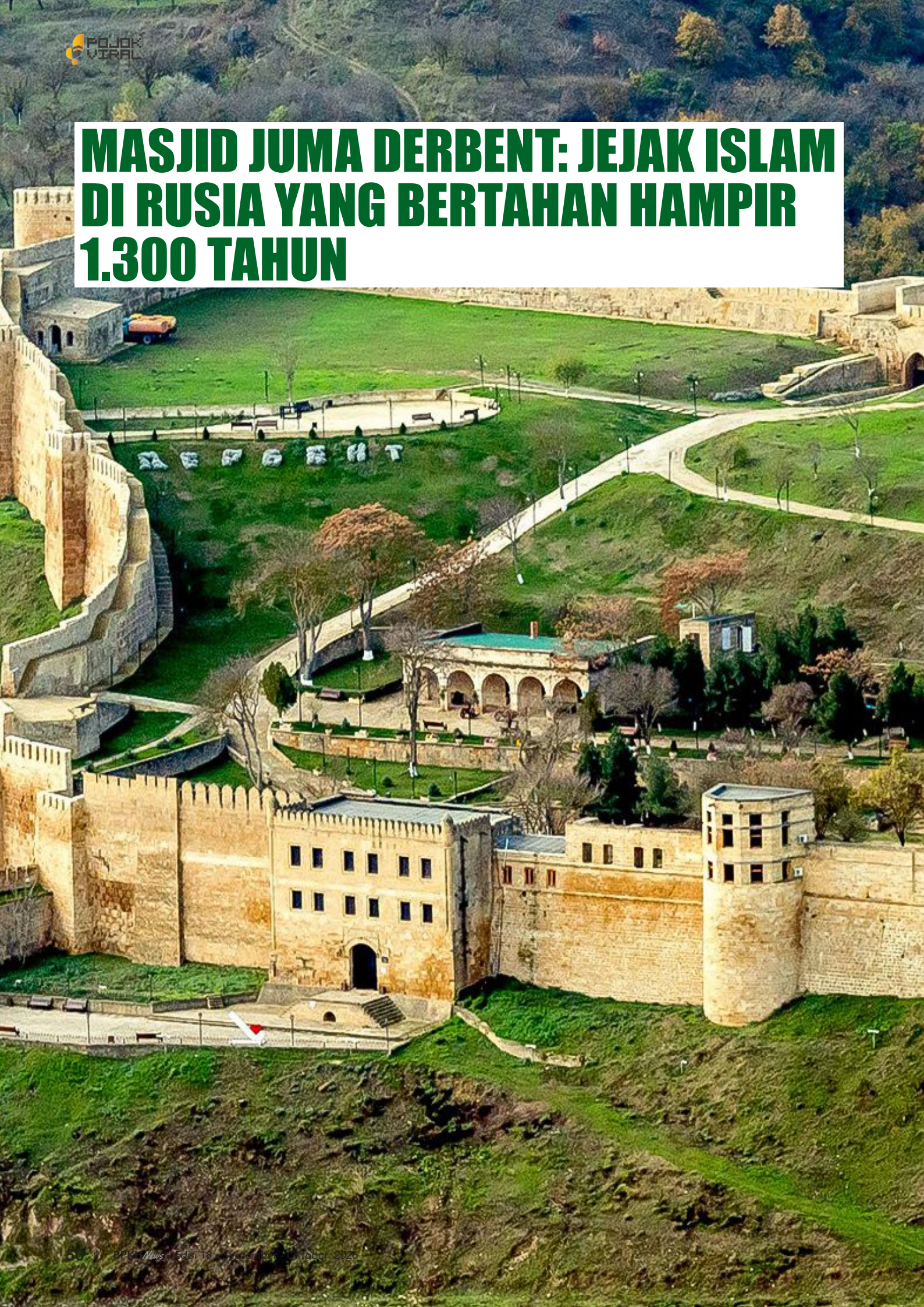
Pengelolaan kerumunan menjadi salah satu contoh bidang yang membutuhkan perpaduan antara penelitian, teknologi, dan koordinasi. Pergerakan jamaah di berbagai lokasi suci berlangsung dalam skala besar dan pada waktu yang sangat padat. Karena itu, pemahaman terhadap pola pergerakan, kapasitas ruang, transportasi, dan potensi kepadatan menjadi penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

Hal serupa berlaku pada layanan kesehatan dan logistik. Kebutuhan jamaah tidak berhenti pada pelaksanaan rangkaian ibadah, tetapi juga mencakup perjalanan, makanan, akomodasi, kesehatan, keamanan, dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya. Semakin kompleks ekosistem tersebut, semakin penting pula keterhubungan antarpenyedia layanan.

Menariknya, forum ini tidak hanya mempertemukan hasil penelitian dengan para pengambil kebijakan, tetapi juga membuka ruang bagi para inovator. Kehadiran *Hajjathon 4*, pameran, poster ilmiah, dan berbagai jalur inovasi memberikan kesempatan bagi gagasan baru untuk diuji dan dikembangkan menjadi solusi yang lebih aplikatif. Semangat tersebut sejalan dengan tujuan *Saudi Vision 2030* dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah dan pengunjung. Penelitian, inovasi, teknologi, dan kolaborasi antarlembaga ditempatkan sebagai bagian dari proses membangun pengalaman Haji dan Umrah yang lebih baik.

Pada akhirnya, forum ilmiah di Makkah ini menunjukkan bahwa masa depan penyelenggaraan Haji tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur fisik. Ia juga bergantung pada kemampuan menghubungkan pengetahuan, data, teknologi, kebijakan, dan kerja sama antarlembaga dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

MASJID JUMA DERBENT: JEJAK ISLAM DI RUSIA YANG BERTAHAN HAMPIR 1.300 TAHUN





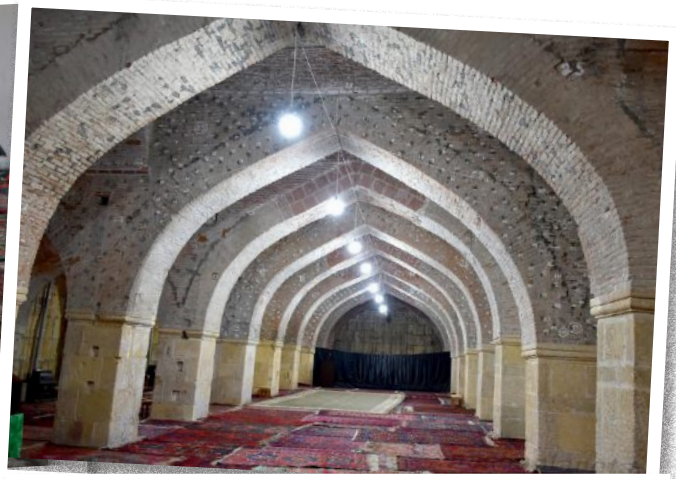
Di antara bangunan-bangunan bersejarah di Kota Derbent, Dagestan, Rusia, berdiri sebuah masjid yang telah menjadi saksi perjalanan panjang Islam di kawasan Kaukasus. Masjid Juma Derbent atau Derbent Juma Mosque diperkirakan dibangun pada 733–734 Masehi, menjadikannya salah satu masjid tertua yang masih berdiri di dunia sekaligus yang tertua di Rusia.

Derbent sendiri merupakan salah satu kota bersejarah di kawasan Kaukasus yang berada di pesisir Laut Kaspia. Kota ini pernah menjadi titik penting dalam jalur pertemuan berbagai peradaban. Di tengah kota tua tersebut, Masjid Juma menjadi bagian dari kompleks arsitektur bersejarah yang terdiri atas bangunan masjid, madrasah, serta sejumlah rumah yang dahulu ditempati para pemuka agama.

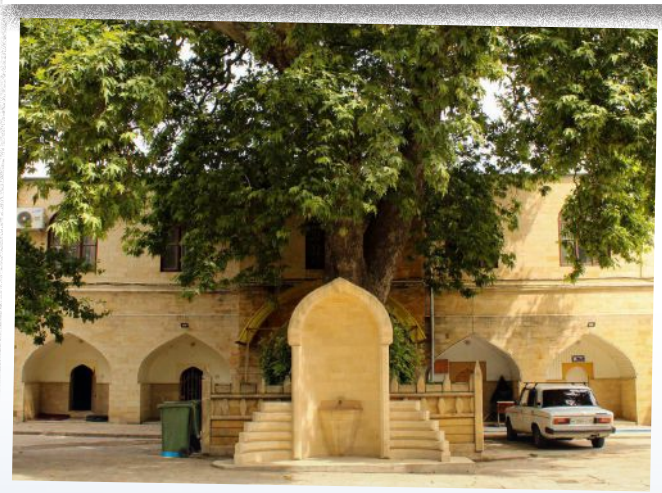
Menurut catatan sejarah, pembangunan masjid berkaitan dengan ekspansi Islam ke kawasan Derbent pada abad ke-8. Panglima Arab, Maslama ibn Abd al-Malik, membagi kota ke dalam sejumlah kawasan permukiman atau magal. Setiap kawasan memiliki masjidnya sendiri, sementara sebuah masjid agung dibangun sebagai tempat pelaksanaan salat Jumat bersama. Masjid inilah yang kemudian dikenal sebagai Masjid Juma.

Bangunan tersebut berukuran sangat besar untuk ukuran zamannya. Masjid membentang sekitar 68 meter dari barat ke timur dan 28 meter dari selatan ke utara. Kubah utamanya menjulang









sekitar 17 meter. Di antara ruang salat dan bangunan madrasah terdapat halaman luas yang pada masa lalu menjadi tempat berlangsungnya berbagai kegiatan keagamaan dan pertemuan masyarakat.

Salah satu karakter paling khas dari kompleks ini adalah pepohonan plane yang tumbuh di halaman masjid. Pohon-pohon tersebut telah berusia ratusan tahun dan menjadi bagian dari lanskap historis kompleks. Pada 2012, pepohonan tersebut ditetapkan sebagai monumen alam yang mendapat perlindungan negara.

Namun, usia panjang Masjid Juma tidak berarti perjalanan sejarahnya selalu berlangsung tanpa gangguan. Pada masa Uni Soviet, kebijakan negara terhadap kehidupan keagamaan membawa perubahan besar bagi masjid ini. Pada 1938, Masjid Juma ditutup dan kompleksnya dialihkan untuk keperluan lembaga-lembaga kota. Ruang salat dan sejumlah bagian bangunan dipisahkan dan digunakan untuk kebutuhan administratif. Aktivitas salat Jumat pun terhenti.

Lima tahun kemudian, situasinya berubah. Pada awal 1943, pemerintah Uni Soviet memutuskan mengembalikan kompleks tersebut kepada kalangan ulama Muslim. Pengembalian bangunan belum serta-merta membuat masjid kembali berfungsi. Masyarakat Derbent terlebih dahulu membersihkan dan menata kembali ruangan yang sebelumnya digunakan untuk keperluan resmi.

Menariknya, proses pemulihan tersebut banyak ditopang oleh masyarakat sendiri. Biaya perbaikan dikumpulkan melalui sumbangan warga. Mereka kemudian membentuk kepengurusan dan menyusun aturan organisasi masjid. Dua imam ditunjuk untuk melayani komunitas Sunni dan Syiah yang hidup berdampingan di Derbent.

Pada Desember 1944, sebuah kegiatan keagamaan besar kembali digelar di kompleks tersebut, menandai kembalinya aktivitas keagamaan setelah masa penutupan. Dalam perkembangan berikutnya, Masjid Juma menjadi salah satu pusat kehidupan keislaman terpenting di kawasan Dagestan selatan. Bahkan hingga awal 1990-an, masjid ini disebut sebagai satu-satunya masjid yang aktif di seluruh Dagestan selatan, sehingga umat Islam dari berbagai wilayah datang untuk beribadah di sana.

Sejarah panjang itu tercermin pula dalam arsitekturnya. Bangunan masjid berbentuk persegi panjang dengan orientasi memanjang dari timur ke barat. Bagian dalamnya memiliki ruang berkubah dengan deretan kolom yang membentuk beberapa bagian ruang. Struktur tersebut juga memperlihatkan lapisan sejarah arsitektur Derbent yang telah mengalami berbagai perubahan dan pembangunan

kembali sepanjang berabad-abad.

Masjid ini pun tidak sepenuhnya luput dari bencana alam. Gempa bumi pernah menyebabkan kerusakan dan mendorong dilakukannya pembangunan serta pemugaran pada berbagai periode. Bentuk yang terlihat saat ini merupakan hasil dari perjalanan panjang restorasi dan perubahan bangunan.

Pada 2019, pekerjaan restorasi kembali dilakukan untuk menjaga keberlangsungan salah satu peninggalan Islam terpenting di kawasan tersebut. Masjid Juma merupakan bagian dari kawasan bersejarah Derbent yang ditetapkan sebagai UNESCO World Heritage Site, sekaligus diakui sebagai situs warisan budaya masyarakat Federasi Rusia.

Kini, hampir 1.300 tahun setelah pertama kali dibangun, Masjid Juma masih menjalankan fungsi keagamaannya. Masjid ini digunakan oleh komunitas Muslim Syiah di Derbent dan tetap menjadi tempat ibadah bagi masyarakat setempat. Pada hari Jumat, jamaah memenuhi ruang utama hingga halaman di antara masjid dan madrasah.

Di sisi lain, masjid ini juga menjadi bagian dari kehidupan budaya dan sejarah Kota Derbent. Wisatawan dapat mengunjungi kompleks tersebut sebagai bagian dari perjalanan menyusuri kota tua. Namun, statusnya sebagai tempat ibadah tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari identitasnya.



KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL

e-Magazine BPKH

Yuk, berbagi cerita, pengalaman, pengetahuan, dan inspirasi bersama melalui Magazine Internal BPKH!

1. TOPIK

Artikel dapat membahas:

- BPKH & Institusi
- Employee Story
- Career Journey
- Knowledge & Insight
- Karya Kreatif

2. KETENTUAN ARTIKEL

- Tulisan orisinal dan belum pernah dipublikasikan.
- Panjang artikel 600–1.500 kata.
- Menggunakan bahasa Indonesia yang baik, komunikatif, dan mudah dipahami.
- Artikel bersifat informatif, humanis, dan relevan bagi karyawan BPKH.
- Data, angka, nama, jabatan, dan informasi lainnya harus akurat.
- Hindari jargon yang berlebihan dan gaya penulisan yang terlalu formal atau promosi.
- Tulisan tidak mengandung unsur SARA, diskriminasi, politik praktis, ujaran kebencian, atau konten yang berpotensi merugikan institusi.

01 / 02

KETENTUAN PENULISAN ARTIKEL
e-Magazine BPKH

3. FOTO & MATERI PENDUKUNG

- Sertakan 2–5 foto yang relevan dan berkualitas baik.
- Sertakan caption dan sumber foto apabila diperlukan.
- Data, grafik, atau infografis wajib mencantumkan sumber.



4. PENGIRIMAN

Artikel dikirim dalam format Word (.doc/.docx) dengan format nama file:

Nama Penulis_Judul Artikel

Setiap artikel akan melalui proses review dan editing oleh tim editorial sebelum diterbitkan.



Mari berbagi cerita dan pengetahuan.

Karena setiap pengalaman di BPKH punya cerita untuk dibagikan.



Muamalat Tower Lantai 15
Jalan Prof. DR. Satrio No.Kav. 18, Kuningan,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940